



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2020-2024**



**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 42 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, dipandang perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Rencana Strategis Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

4. Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1.1101.30013101 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Dewan Ketahanan Nasional tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra Wantannas adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.

Pasal 2

Renstra Wantannas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Wantannas yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Wantannas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 11 Mei 2020



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

ACHMAD DJAMALUDIN
LAKSAMANA MADYA TNI

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 42 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2020-
2024



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2020-2024**

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan setiap pimpinan Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden R.I. Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Setjen Wantannas tahun 2020-2024.

Renstra Wantannas Tahun 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Wantannas untuk 5 (lima) tahun ke depan. Disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Setjen Wantannas periode 2015-2019, analisa dinamika terhadap dinamika lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional serta sebagai tindak lanjut Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Setjen Wantannas harus melaksanakannya dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan Visi Renstra Wantannas periode 2020-2025 yaitu "Dewan Ketahanan Nasional yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong" yang harus dievaluasi setiap tahun dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, untuk dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah Misi Wantannas periode 2020-2024 yaitu memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsive, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana Lembaga Dewan Ketahanan Nasional.

Sekretaris Jenderal

Dewan Ketahanan Nasional,



Achmad Djamaludin

Laksamana Madya TNI

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	- 3 -
1.1 KONDISI UMUM	- 3 -
1.1.1 Hasil Capaian Kinerja Setjen Wantannas.....	- 4 -
1.1.2 Anggaran	- 8 -
1.1.3 Regulasi	- 8 -
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	- 9 -
1.2.1 Potensi dan Permasalahan Global (Internasional-Regional).....	- 9 -
1.2.2 Potensi dan Permasalahan Nasional.....	- 18 -
1.2.3 Analisa Lingkungan Strategis (<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats/SWOT</i>).....	- 29 -
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN WANTANNAS	- 32 -
2.1 VISI WANTANNAS.....	- 32 -
2.2 MISI WANTANNAS.....	- 33 -
2.3 TUJUAN WANTANNAS.....	- 33 -
2.4 SASARAN STRATEGIS	- 33 -
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,	- 35 -
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL.....	- 35 -
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI WANTANNAS DAN SETJEN WANTANNAS	- 36 -
1. Arah kebijakan dan strategi Wantannas:	- 36 -
2. Arah kebijakan dan strategi Setjen Wantannas:.....	- 36 -
3.3 KERANGKA REGULASI.....	- 39 -
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN.....	- 40 -
3.4.1 Peran, Tugas, dan Fungsi Wantannas	- 40 -
3.4.2 Struktur Organisasi Wantannas	- 41 -
3.4.3 Peran, Tugas, dan Fungsi Setjen Wantannas	- 42 -
3.4.4 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	- 43 -
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	- 47 -
4.1 TARGET KINERJA.....	- 47 -
Tabel 7 Sasaran Strategis	- 48 -
Tabel 8 Program Teknis.....	- 49 -
Tabel 9 Program Generik.....	- 52 -
Tabel 10 Kegiatan Prioritas.....	- 53 -
Tabel 11 Kegiatan Deputi Pengkajian dan Penginderaan.....	- 53 -
Tabel 12 Kegiatan Deputi Sistem Nasional.....	- 54 -
Tabel 13 Kegiatan Deputi Politik dan Strategi.....	- 56 -

Tabel 14 Kegiatan Deputi Pengembangan.....	- 58 -
Tabel 15 Kegiatan Staf Ahli	- 60 -
Tabel 16 Kegiatan Generik	- 60 -
4.2 KERANGKA PENDANAAN	- 62 -
4.2.1 Kerangka Pendanaan menurut RPJMN 2020-2024	- 62 -
Tabel 17 Sasaran Strategis	- 63 -
Tabel 18 Program Teknis dan Generik	- 63 -
Tabel 19 Kegiatan Prioritas	- 63 -
Tabel 20 Kegiatan Teknis Deputi Pengkajian dan Penginderaan	- 64 -
Tabel 21 Kegiatan Teknis Deputi Sistem Nasional	- 64 -
Tabel 22 Kegiatan Teknis Deputi Politik dan Strategi	- 64 -
Tabel 23 Kegiatan Teknis Deputi Pengembangan	- 65 -
Tabel 24 Kegiatan Teknis Staf Ahli.....	- 65 -
Tabel 25 Kegiatan Generik	- 65 -
4.2.2 Kerangka Pendanaan menurut Anggaran Ideal Wantannas 2020-2024	- 65 -
Tabel 26 Sasaran Strategis	- 66 -
Tabel 27 Program Teknis dan Generik	- 66 -
Tabel 28 Kegiatan Prioritas	- 67 -
Tabel 29 Kegiatan Teknis Deputi Pengkajian dan Penginderaan	- 67 -
Tabel 30 Kegiatan Teknis Deputi Sistem Nasional	- 67 -
Tabel 31 Kegiatan Teknis Deputi Politik dan Strategi	- 68 -
Tabel 32 Kegiatan Teknis Deputi Pengembangan	- 68 -
Tabel 33 Kegiatan Teknis Staf Ahli.....	- 68 -
BAB V PENUTUP	- 69 -
LAMPIRAN	- 70 -
Format 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga menurut RPJMN 2020-2024	i
Format 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga menurut anggaran ideal Wantannas 2020-2024.....	xxiii
Format 2. Matriks Kerangka Regulasi.....	xlv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Kehidupan nasional Indonesia dalam 5 tahun ke depan, diperkirakan akan diwarnai perubahan geopolitik dan geostrategi. Hal tersebut dapat berimplikasi menjadi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dari berbagai sektor yang meliputi di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum, dan Pertahanan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM) baik eksternal maupun internal secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada tataran lingkungan strategis eksternal terdapat perubahan jenis dan bentuk konflik yang dapat mempengaruhi kondisi domestik sebuah negara. Sementara pada tataran lingkungan strategis internal, kurang optimalnya pengelolaan aspek politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, pertahanan, dan keamanan dapat menimbulkan *insecurity*. Dinamika lingkungan strategis tersebut menunjukkan semakin kompleksnya hakikat, sifat, dan bentuk ancaman sehingga dibutuhkan keuletan dan ketangguhan untuk pengembangan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi dan mengatasi AGHT tersebut melalui kebijakan dan strategi yang terintegrasi dan tersinergi secara komprehensif dan holistik dari seluruh aspek kehidupan nasional.

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan

dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Untuk itu, Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk memastikan keterlibatan Wantannas dalam menciptakan kondisi ketahanan nasional yang tangguh sehingga mampu berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan RPJMN dan visi misi Presiden. Oleh karena itu, materi penyusunan Renstra Wantannas ini sendiri dilakukan sesuai dengan RPJMN, visi misi Presiden, tugas pokok, dan fungsi Wantannas, serta capaian kinerja periode 2015-2019.

1.1.1 Hasil Capaian Kinerja Setjen Wantannas

Pencapaian kinerja Setjen Wantannas Tahun 2015-2019 sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015-2019. Penjelasan pada Tabel 1 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun kelima dari Renstra Setjen Wantannas 2015-2019 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun hasil pencapaian atas target kinerja masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

a. Capaian Sasaran Strategis 1: Terbinanya kondisi ketahanan nasional dalam rangka menjamin keselamatan, kelangsungan hidup bangsa dan negara dari ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan

Sesuai dengan Sasaran Strategis 1 dengan indikator Indeks Ketahanan Nasional (Rata-rata persentase jumlah produk saran tindak kebijakan pembinaan ketahanan nasional yang ditindaklanjuti), Setjen Wantannas telah merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam 5 tahun, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tahun 2015 Setjen Wantannas telah menghasilkan 165 naskah kajian dari 165 naskah kajian yang ditargetkan. Dari 165 naskah kajian yang dihasilkan oleh Setjen Wantannas pada Tahun 2015, semuanya telah disampaikan kepada Presiden RI dan telah digunakan sebagai bahan pertimbangan Presiden RI dalam mengambil keputusan kenegaraan. Dengan demikian,

- pencapaian program dan kegiatan pengembangan kebijakan ketahanan nasional telah tercapai dengan maksimal;
- 2) Pada Tahun 2016 Setjen Wantannas telah menghasilkan 165 naskah kajian dari 165 naskah kajian yang ditargetkan. Dari 165 naskah kajian yang dihasilkan oleh Setjen Wantannas pada Tahun 2016, semuanya telah disampaikan kepada Presiden RI dan telah digunakan sebagai bahan pertimbangan Presiden RI dalam mengambil keputusan kenegaraan. Dengan demikian pencapaian program dan kegiatan pengembangan kebijakan ketahanan nasional telah tercapai dengan maksimal;
 - 3) Pada Tahun 2017 Setjen Wantannas telah menghasilkan 167 naskah kajian dari 167 naskah kajian yang ditargetkan. Dari 167 naskah kajian yang dihasilkan oleh Setjen Wantannas pada Tahun 2016, semuanya telah disampaikan kepada Presiden RI dan telah digunakan sebagai bahan pertimbangan Presiden RI dalam mengambil keputusan kenegaraan. Dengan demikian, pencapaian program dan kegiatan pengembangan kebijakan ketahanan nasional telah tercapai dengan maksimal;
 - 4) Pada Tahun 2018 Setjen Wantannas telah menghasilkan 97 naskah kajian dari 97 naskah kajian yang ditargetkan. Dari 97 naskah kajian yang dihasilkan oleh Setjen Wantannas pada Tahun 2018, semuanya telah disampaikan kepada Presiden RI dan telah digunakan sebagai bahan pertimbangan Presiden RI dalam mengambil keputusan kenegaraan. Dengan demikian, pencapaian program dan kegiatan pengembangan kebijakan ketahanan nasional telah tercapai dengan maksimal; dan
 - 5) Pada Tahun 2019 Setjen Wantannas telah menghasilkan 97 naskah kajian dari 97 naskah kajian yang ditargetkan. Dari 97 naskah kajian yang dihasilkan oleh Setjen Wantannas pada Tahun 2019, semuanya telah disampaikan kepada Presiden RI dan telah digunakan sebagai bahan pertimbangan Presiden RI dalam mengambil keputusan kenegaraan. Dengan demikian pencapaian program dan kegiatan pengembangan kebijakan ketahanan nasional telah tercapai dengan maksimal.

Tabel 1
Capaian Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/ Indikator	Lokasi	Target					Realisasi				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program 1: Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional			80	82	84	86	88	80	82	84	86	88
Kegiatan 1: Perumusan Kebijakan dan Strategi Sistem Nasional Bidang Lingkungan Alam			11	11	7	6	6	11	11	7	6	6
Kegiatan 2: Perumusan Kebijakan dan Strategi Sistem Nasional Bidang Lingkungan Pemerintahan Negara			10	10	9	6	6	10	10	9	6	6
Kegiatan 3: Perumusan Kebijakan dan Strategi Sistem Nasional Bidang Lingkungan Sosial			8	8	10	6	6	8	8	10	6	6
Kegiatan 4: Perumusan Kebijakan Sistem Nasional Bidang Informasi dan Pengolahan Data			8	8	7	6	6	8	8	7	6	6
Kegiatan 5: Perumusan Kebijakan Politik dan Strategi Bidang Politik Nasional			13	13	17	8	8	13	13	17	8	8
Kegiatan 6: Perumusan Kebijakan Politik dan Strategi Bidang Strategi Nasional			13	13	19	7	7	13	13	19	7	7
Kegiatan 7: Perumusan Kebijakan Politik dan Strategi Bidang Rencana Kontinjensi			9	9	17	6	6	9	9	17	6	6
Kegiatan 8: Perumusan Kebijakan dan Strategi Penginderaan dan Perkiraan Ancaman Bidang Lingkungan Strategis Nasional			11	11	10	7	7	11	11	10	7	7
Kegiatan 9: Perumusan Kebijakan dan Strategi Penginderaan dan Perkiraan Ancaman Bidang Lingkungan Strategis Regional			11	11	11	7	7	11	11	11	7	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kegiatan 10: Perumusan Kebijakan dan Strategi Penginderaan dan Perkiraan Ancaman Bidang Lingkungan Strategis Internasional			12	12	12	8	8	12	12	12	8	8
Kegiatan 11: Perumusan Kebijakan dan Strategi Evaluasi Pembangunan dan Pemecahan Krisis Bidang Hukum dan Perundang-undangan			8	8	6	6	6	8	8	6	6	6
Kegiatan 12: Perumusan Kebijakan dan Strategi Evaluasi Pembangunan dan Pemecahan Krisis Bidang Ekonomi			10	10	10	6	6	10	10	10	6	6
Kegiatan 13: Perumusan Kebijakan dan Strategi Evaluasi Pembangunan dan Pemecahan Krisis Bidang Sosial Budaya			7	7	9	6	6	7	7	9	6	6
Kegiatan 14: Perumusan Kebijakan dan Strategi Evaluasi Pembangunan dan Pemecahan Krisis Bidang Pertahanan Keamanan			11	11	8	6	6	11	11	8	6	6
Kegiatan 15: Perumusan Saran Tindak kebijakan dan Strategi Nasional Terkait Keahlian Tertentu			23	23	15	6	6	23	23	15	6	6
Kegiatan 16: Pengembangan Sistem Informasi Wantannas			77	30	100	-	-	77	30	100	-	-

b. Capaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya organisasi kelembagaan Wantannas yang efektif dan efisien

Sesuai dengan Sasaran Strategis 2 dengan indikator Indeks Kesehatan Organisasi (hasil capaian kerja organisasi), Setjen Wantannas telah merealisasikan target yang telah ditetapkan dalam 5 tahun. Sebagai program pendukung untuk mencapai sasaran strategis Setjen Wantannas, beberapa unit eselon II (Kebiroan) telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai yang ditargetkan selama 5 tahun, dengan rincian sebagai berikut:

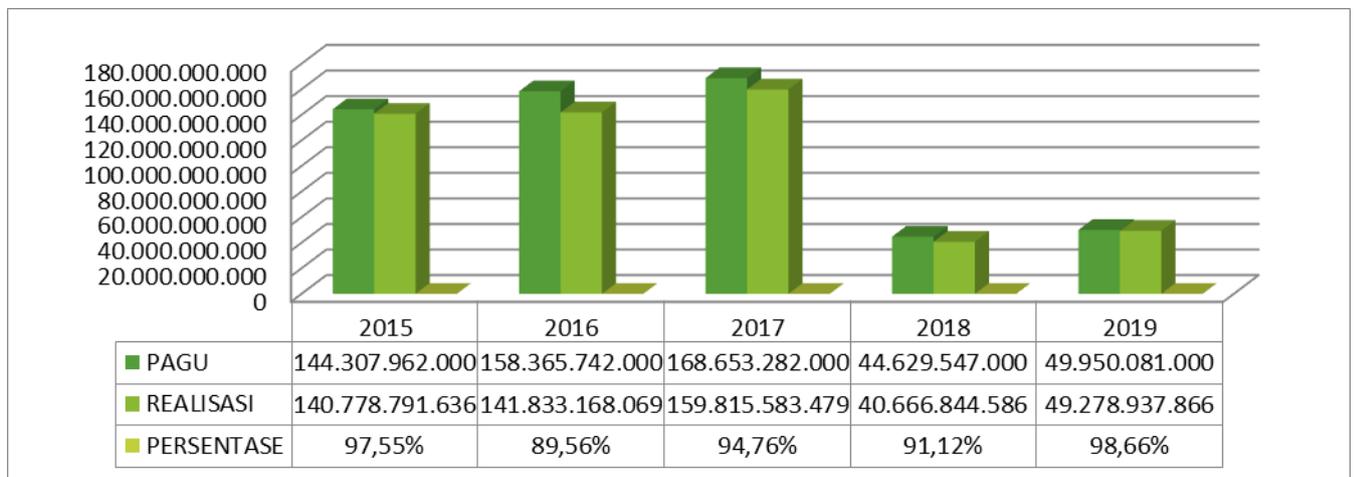
Tabel 2
Capaian Kinerja Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Lokasi	Target					Realisasi				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program 2: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			80	82	84	86	88	80	82	84	86	88
Kegiatan 2: Pengelolaan Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan			24	36	36	4	6	24	36	36	4	6
Kegiatan 2: Pengelolaan Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan Internal			12	24	12	3	2	12	24	12	3	2
Kegiatan 3: Pengelolaan Internal Perkantoran dan Kepegawaian			7	7	6	5	5	7	7	6	5	5

1.1.2 Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Setjen Wantannas selama rentang waktu 2015-2019 dialokasikan anggaran sebagai berikut:

Diagram 1
Capaian Penyerapan Anggaran 2015-2019
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional



1.1.3 Regulasi

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Peraturan . . .

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- f. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- h. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1.1101.30013101 tanggal 31 Januari 2000 tentang Organisasi, Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam upaya mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis, Indonesia dihadapkan pada dinamika perubahan geopolitik dan geostrategis terhadap permasalahan dan tantangan yang semakin kompleks baik global (internasional, regional) maupun nasional.

1.2.1 Potensi dan Permasalahan Global (Internasional-Regional)

Dinamika geopolitik global berpengaruh terhadap pembangunan Indonesia, persaingan antar kekuatan besar dunia menimbulkan depolarisasi pusat geopolitik baik di Barat (Amerika dan Eropa) maupun di Kawasan Timur (Asia). Selain itu, terdapat dinamika geopolitik berupa sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS). Klaim dan

ekspansi . . .

ekspansi militer Tiongkok di LTS meningkatkan ketegangan di Kawasan. Amerika Serikat (AS) merespon Tiongkok dengan menggelar kekuatan di LTS. Persaingan juga ditemukan di sektor ekonomi dan perumusan kerangka arsitektur regional. Perang dagang AS dan Tiongkok menjadi contoh persaingan di sektor ekonomi. Mudah-mudahan pergerakan aktor nonnegara secara transnasional membuat dinamika ancaman nontradisional menjadi isu strategis bagi Indonesia, yang menjadi perhatian besar adalah:

- a. Terorisme;
- b. Perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak Indonesia yang rentan menjadi korban perdagangan manusia;
- c. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, terutama dengan makin intensnya penyelundupan narkoba ke Indonesia;
- d. *Illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing* yang sering terjadi di wilayah laut Indonesia; dan
- e. Keamanan siber.

Sementara itu, isu lain yang perlu diperhatikan Indonesia adalah melemahnya multilateralisme dan populisme. Kedua isu ini berdampak pada pelemahan tata cara global, yang mendorong negara-negara cenderung mengeluarkan kebijakan *unilateral*.

Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas Wantannas dalam melaksanakan pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko pembangunan nasional. Selain permasalahan di atas, potensi lingkungan strategis global (internasional/regional) yang dihadapi terkait dengan Ketahanan Nasional, khususnya dalam bidang Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hankam adalah sebagai berikut:

a. Politik

Potensi

- 1) Sistem pemerintahan yang demokratis memiliki pengaruh yang luas terhadap tata kelola pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif dalam menyampaikan aspirasi politik yang diwarnai oleh para elit politik dari berbagai Negara;
- 2) Masuknya Indonesia sebagai anggota tidak tetap di DK PBB membuka peluang untuk mengangkat aspirasi penciptaan stabilitas di berbagai kawasan termasuk upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah khususnya Palestina dan Israel; dan
- 3) Pergeseran polarisasi politik global membuka peluang aliansi baru bagi negara-negara di kawasan.

Permasalahan

- 1) Ego sektoral dalam sistem politik nasional yang lebih mengedepankan kepentingan internal negara daripada kepentingan bilateral dan multilateral menimbulkan ketidakpastian dalam penguatan kerja sama regional maupun kawasan; dan
- 2) Perbedaan dalam sistem pemerintahan dan aliran politik *the ruling class* di setiap negara menjadi penghambat dalam membangun efektifitas kerja sama lintas negara.

b. Hukum

Potensi

- 1) Semakin intensifnya kerja sama melalui organisasi internasional dan regional membuka ruang komunikasi untuk penyalarsan kepentingan guna melancarkan kerja sama lintas negara; dan
- 2) Semakin besarnya pengaruh sistem transportasi dan komunikasi serta informasi dalam bingkai kepentingan bersama masyarakat bangsa mendorong kebutuhan pengaturan bersama guna pencapaian kepentingan bersama.

Permasalahan

- 1) Perbedaan sistem hukum dan pandangan politik pada kelembagaan pemerintahan di masing-masing negara menyebabkan terhambatnya perumusan kesepakatan yang dapat saling mengikat dan saling menguntungkan kendati telah ada hukum internasional sebagai instrumen penyelesaian konflik hukum dan politik antarnegara; dan
- 2) Berkembangnya gejala pandangan politik personal kepala pemerintahan di masing-masing negara mempengaruhi fleksibilitas kebijakan yang diselenggarakan oleh suatu negara.

c. Keamanan

Potensi

- 1) Abad ke-21 ditandai dengan dominasi kepentingan ekonomi guna kesejahteraan bangsa-bangsa sehingga kemungkinan perang terbuka antarnegara relatif kecil, potensial untuk mengembangkan kerja sama saling menguntungkan; dan
- 2) Kemajuan teknologi persenjataan di banyak negara menyebabkan meningkatnya kehati-hatian untuk menimbulkan konflik bersenjata secara terbuka sebab resikonya yang sangat besar, lebih diarahkan kepada efek penangkalan.

Permasalahan

- 1) Berkembangnya pengaruh radikalisme dan ketidakpuasan serta kecemburuan dalam kawasan menjadi sumber ancaman keamanan di berbagai Negara; dan
- 2) Dominasi negara-negara “berpengaruh” pada lembaga-lembaga internasional sehingga memungkinkan terjadinya pengabaian atas keputusan bersama melalui lembaga internasional.

d. Ekonomi

Potensi

- 1) Revolusi industri 4.0 yang telah direspon secara proaktif oleh Kementerian Perindustrian membuka peluang luas untuk memanfaatkan produk-produk manufaktur utamanya otomotif, elektronik, garmen, kimia untuk mengisi pasar ekspor baru, tanpa mengabaikan ekspor energi batu bara yang masih memiliki prospek cukup baik untuk mendapatkan devisa;
- 2) Percepatan kelancaran Sistem Logistik Nasional (Sislognas) setelah terhubungnya kegiatan ekonomi antarpulau, merupakan peluang untuk mendorong peningkatan/pertumbuhan ekonomi nasional;
- 3) Pendayagunaan potensi yang terkandung dalam wilayah laut beserta isinya memberikan peluang yang luas bagi terselenggaranya kegiatan kemaritiman mulai dari perdagangan lewat laut, pelayaran/perkapalan/transportasi laut, *bulk carrier, super tanker, cargo, oil, public good*, penelitian, pertambangan bawah laut, perikanan laut, pelestarian lingkungan laut dan pertolongan bencana;
- 4) Perluasan pembangunan infrastruktur berorientasi pada multimoda membuka peluang berkembangnya sentra produksi ekonomi baik di kawasan pesisir pulau-pulau kecil maupun di wilayah pedalaman, keseluruhannya berorientasi pada ekspor tanpa mengabaikan kebutuhan pasar domestik;
- 5) Penguatan perdagangan antarnegara pada forum Indo Pasifik, *ASEAN-China Free Trade Agreement (CAFTA)*, APEC, merupakan peluang untuk memperdagangkan produk manufaktur andalan (otomotif, elektronik, garmen, dan kimia) untuk mengisi pasar ekspor baru;
- 6) Pengembangan RI 4.0 yang telah dirintis oleh Kementerian Perindustrian merupakan peluang dan *pilot project* bagi pengembangan agro industri, agribisnis, industri otomotif berbasis robot, industri elektronik berbasis *nano tech*;

7) Perluasan . . .

- 7) Perluasan keterbukaan informasi sebagai konsekuensi dari perkembangan dunia maya semakin membuka peluang tersedianya berbagai informasi yang diperlukan untuk mendukung pengembangan nilai tambah dan daya saing untuk industri RI 4.0;
- 8) Pertumbuhan sektor jasa di atas rata-rata pertumbuhan nasional (di atas 6%), membuka peluang berkembangnya usaha jasa produktif, dan membuka peluang bagi penduduk usia muda memenuhi tuntutan ketenagakerjaan sektor jasa; dan
- 9) Percepatan globalisasi dengan segala aspeknya semakin memberi peluang untuk mempercepat mobilitas orang, jasa, keuangan, dan barang yang didukung oleh kemudahan pariwisata, komunikasi, transportasi, dan perdagangan.

Permasalahan

- 1) Peranan perwakilan perdagangan RI di luar negeri yang belum merata sampai menjangkau pasar ekspor baru, merupakan kendala dalam perluasan dan intensifikasi perdagangan RI khususnya dalam upaya pemasaran produk manufaktur;
- 2) Penolakan dari sementara pihak di Eropa dan Amerika terhadap produk primer sawit merupakan kendala dalam pemasaran produk primer, sebaliknya produk hilir masih mungkin diperdagangkan;
- 3) Posisi dan kondisi geografis yang beragam dan berada pada posisi *ring of fire*, merupakan kendala karena rawan terhadap bencana alam, banyaknya wilayah *remote area*, memerlukan dukungan sarana transportasi dan komunikasi guna memperlancar kegiatan ekonomi;
- 4) Persebaran masyarakat maritim Indonesia di wilayah pesisir, pulau, kepulauan belum secara merata memiliki kesadaran akan budaya maritim, penguasaan teknologi dan industri kemaritiman masih terbatas di pelabuhan-pelabuhan besar, tenaga kerja kemaritiman masih terbatas kepada kepelautan, di

samping itu persyaratan kompetensi pelaut Indonesia belum memenuhi standar kompetensi pelaut internasional, merupakan kendala dalam pengembangan MDA;

- 5) Pemenuhan kebutuhan investasi besar asing dan domestik berorientasi pada teknologi tinggi sesuai tuntutan RI 4.0 yang masih minim merupakan kendala bagi pembangunan sentra produksi ekonomi baik di kawasan pesisir, maupun di wilayah pedalaman dan pulau-pulau besar kecil;
- 6) Penguatan tingkat kepercayaan para mitra (*trust building*), dan *soft approach* memerlukan *economy cost* cukup tinggi masih merupakan kendala dalam membangun kemitraan saling menguntungkan perdagangan antarnegara;
- 7) Pengembangan potensi ketenagakerjaan belum didukung oleh fasilitas *Training of Trainer* (ToT) dan penetapan standar sertifikasi ketenagakerjaan merupakan kendala dalam mengisi pasar tenaga kerja sesuai tuntutan RI 4.0;
- 8) Pengembangan produk industri hilir belum didukung oleh tenaga profesional domestik, keterampilannya belum didukung oleh sertifikasi dan dianggap berada pada sektor informal merupakan kendala dalam mengisi pasar tenaga kerja dalam dan luar negeri, dalam persaingan dengan tenaga profesional asing; dan
- 9) Percepatan globalisasi dengan segala aspeknya merupakan kendala bagi keabsahan batas fisik antarnegara implikasinya semakin menurunkan tugas peran dan fungsi pemerintahan negara, cenderung mengarah kepada neoliberalisme.

e. Sosial Budaya

Potensi

- 1) Pengembangan kecerdasan buatan sebagai konsekuensi kehadiran teknologi digital membuka peluang kemudahan pengenalan preferensi konsumen;
- 2) Pengembangan informasi mutakhir semakin membuka peluang *long distance learning*, peserta didik semakin aktif mengikuti

informasi . . .

- informasi mutakhir, mempercepat peningkatan kemahiran/profesionalisme sesuai bakat/minatnya;
- 3) Perluasan FoMo (*Fear of Moving Out*-khawatir ketinggalan informasi mutakhir), membuka peluang bagi para peminat keterbukaan informasi untuk semakin giat mencari dan memperoleh (setelah disensor secara proaktif) informasi relevan dan mutakhir dengan perkembangan kehidupan masyarakat antarbangsa;
 - 4) Percepatan modernisasi dan westernisasi semakin membuka peluang berkembangnya gaya hidup metropolis dari generasi milenial. Hal positif yang cukup mengemuka adalah berkembangnya kreatifitas, produktifitas, inovasi untuk mengembangkan produk baru berkualitas;
 - 5) Pengembangan *realizing society* 5.0 merupakan realitas yang semakin membuka peluang bagi kehidupan masyarakat antarbangsa untuk mengikuti kemajuan pola hidup masyarakat Jepang yang semakin modern, mengembangkan *smart living* namun tetap mampu mempertahankan adat dan budaya asli yang dikenal sebagai “bushido”;
 - 6) Peningkatan tuntutan sepuluh *skill*/keterampilan baru memiliki peluang cukup besar dengan berkembangnya *Artificial Intelligence* (AI), otomatisasi dan perkembangan teknologi digital;
 - 7) Pengembangan keterampilan baru dari masyarakat penikmat *long distance learning* berbasis internet membuka peluang berkembangnya lapangan pekerjaan baru yang belum dikenal sebelumnya;
 - 8) Peningkatan kesadaran manusia akan pentingnya nilai kemanusiaan berbasis pada *human security* dan *human rights* merupakan peluang yang cukup besar bagi golongan minoritas untuk mempertahankan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat mayoritas dalam kedudukan setara; dan
 - 9) Peningkatan sampah produk yang dikategorikan kadaluwarsa (*obsolete*) menjadi komoditi ekspor relatif murah dari negara

tertentu, membuka peluang bagi masyarakat tertentu untuk memperoleh kebutuhannya.

Permasalahan

- 1) Peningkatan tuntutan kemajuan teknologi industri yang menyertai perkembangan RI 4.0 dan belum diikuti oleh kemampuan SDM merupakan kendala bagi tenaga kerja untuk memenuhi pasar tenaga kerja berbasis RI 4.0;
- 2) Penurunan kualitas hubungan kekeluargaan antara orang tua, anak dan saudara, sebagai dampak negatif dari keterbukaan informasi seperti kecanduan internet, berkembangnya sikap individualistis/kurang peduli terhadap lingkungannya, merupakan kendala bagi penguatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 3) Peningkatan kecemasan sosial dan FoMo karena ketinggalan untuk memperoleh informasi mutakhir dan relevan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern bagi sebagian kelompok masyarakat yang tidak mampu mengikuti modernisasi, westernisasi, dan *disruptive technology*, merupakan kendala dalam pemeliharaan karakter bangsa;
- 4) Pengaruh negatif *realizing society* 5.0 dan Revolusi Industri/RI 4.0 bagi masyarakat yang tidak mampu mengikuti dinamika perkembangannya dapat menimbulkan gegar budaya merupakan kendala dalam mempertahankan budaya lama dan budaya baru belum mapan;
- 5) Percepatan perubahan yang disebabkan oleh revolusi teknologi, *nanotechnology*, *nanorobotics*, merupakan kendala jika tidak diikuti oleh pola pikir dan pola sikap kritis sehingga dapat menimbulkan kecemasan sosial;
- 6) Perkembangan individual *long distance learning* akan mendorong penurunan peran dan fungsi lembaga pendidikan formal, merupakan kendala bagi lembaga pendidikan untuk mempertahankan *atribut world class university*; dan

7) Perkembangan . . .

- 7) Perkembangan politik identitas, radikalisme, dan fanatisme sempit, merupakan kendala bagi penguatan *human security* dan *human rights*.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan Nasional

Beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman yang mengganggu keamanan dan kedaulatan negara. Intoleransi yang menguat ditandai dengan tren penolakan pemimpin yang berbeda agama. Selain itu, politik identitas digunakan oleh calon kepala daerah dalam pilkada di beberapa daerah. Indeks demokrasi Indonesia menunjukkan masih adanya kesenjangan demokrasi kesenjangan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Tantangan lain yang di hadapi adalah tidak meratanya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi hal ini ditandai dengan masih adanya kepala daerah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Selain itu masih adanya kelompok kriminal bersenjata yang mengancam kedaulatan negara seperti di Papua. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keamanan.

Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas Wantannas dalam melaksanakan pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko pembangunan nasional. Selain permasalahan di atas, potensi lingkungan strategis global (internasional/regional) yang dihadapi terkait dengan Ketahanan Nasional, khususnya dalam bidang Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Hankam sebagai berikut:

a. Politik

Potensi

- 1) Pemahaman dari berbagai organisasi dan kelompok masyarakat dalam penerimaan empat konsensus dasar nasional berpartisipasi dalam kehidupan nasional tercermin

dari . . .

dari meningkatnya partisipasi masyarakat sipil dalam kaderisasi bela negara didukung oleh: (a) Penetapan Inpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara; dan (b) Tersusunnya Modul Utama pedoman nasional untuk penyelenggaraan program bela negara sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara;

- 2) Peningkatan keberhasilan bangsa Indonesia dalam mengatasi dan keluar dari permasalahan konflik sosial dan politik serta ancaman bencana, didukung oleh komitmen TNI-Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada berbagai dinamika dan gangguan keamanan dalam negeri dan ketertiban masyarakat berbasis pada UU tentang TNI, UU tentang Polri dan bantuan kekuatan TNI kepada Polri serta penanggulangan bencana sesuai dengan OMSP; dan
- 3) Perluasan jangkauan infrastruktur dan sistem ekonomi pasar, berkembangnya sistem informasi dan komunikasi dalam layanan satu pintu sehingga membuka peluang layanan yang lebih lancar bagi masyarakat di daerah dan pengembangan daerah tanpa harus melalui pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Permasalahan

- 1) Belum terbangunnya jiwa sportivitas dalam berdemokrasi melalui pemilihan umum, indikatornya antara lain berkembangnya fenomena radikalisme yang memanfaatkan situasi transisi politik untuk mencapai tujuan kelompok.
- 2) Hasrat kekuasaan dan perluasan simpul-simpul partai politik serta semangat lokal kedaerahan sebagai aktualisasi “putra daerah” dapat menghambat penguatan moratorium DOB; dan
- 3) Pembudayaan semangat bela negara belum efektif, belum terwujudnya standardisasi program dan nomenklatur kegiatan bela negara secara nasional dan keterbatasan rentang waktu

Inpres Nomor 7 Tahun 2018, yang hanya berlaku sampai tahun 2019.

b. Hukum

Potensi

- 1) Telah tersusunnya sistem nasional pencatatan kedatangan orang asing pada pintu-pintu kedatangan (*entry point*), didukung oleh terbentuknya tim PORA mulai dari tingkat pusat, provinsi, kota, kabupaten, dan kecamatan (2.690 tim);
- 2) Berkembangnya sistem *e-government* dalam tata kelola pemerintahan/reformasi birokrasi dan komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi sebagai *extra ordinary crime*, didukung oleh peningkatan kinerja lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi (Saber Pungli, dll);
- 3) Pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Permenlu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan WNI yang Komprehensif, terbentuknya “Portal Peduli WNI” sebagai *platform* layanan dan perlindungan WNI yang memiliki *database* WNI di luar negeri dan semakin baiknya hubungan Pemerintah RI dengan berbagai negara di kawasan;
- 4) Komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan serta menjadikan kawasan terumbu karang sebagai objek wisata, didukung oleh UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, kewenangannya mencakup pengaturan wilayah perikanan dan terumbu karang;
- 5) Komitmen pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, sesuai dengan amanat UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor

Narkotika . . .

Narkotika (P4GN), menjangkau seluruh wilayah nasional, tercermin dari Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar), khusus untuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba diupayakan secara bertahap mulai dari kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; dan

- 6) Komitmen pemerintah untuk merevisi jumlah negara penerima Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian perihal hak kedaulatan negara dalam penerapan prinsip timbal balik (resiprositas) dan asas manfaat dalam pemberian BVKS terhadap orang asing, utamanya negara tertentu yang tidak memberikan manfaat secara signifikan terhadap kepentingan perekonomian Indonesia.

Permasalahan

- 1) Pengawasan PORA masih mengalami: (a) belum efektifnya sistem pengawasan orang asing secara terintegrasi sejalan dengan peningkatan jumlah pintu *entry* orang asing; (b) keterbatasan jumlah aparat dan satuan kerja (125 Kantor Imigrasi) yang belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja keimigrasian; (c) belum terdukungnya koneksitas Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) pada seluruh *entry point* WNA secara nasional mengawasi rentang *locus delicti* pelanggaran hukum WNA; (d) belum meratanya pengawakan dalam pelaksanaan tugas fungsi instansi vertikal Kemenkum HAM cq. Ditjen Keimigrasian tentang pelaksanaan fungsi keimigrasian pada *entry point* WNA di daerah tertentu, untuk mendapat dukungan dari Pemda;
- 2) Komitmen pemerintah dalam memantau dana WNI di bank luar negeri, telah didukung oleh MLA namun masih lemah dalam mengembangkan komunikasi saling percaya dalam bentuk *Central Authority* (CA) Indonesia dengan negara-negara terkait,

selain itu masih adanya negara tertentu yang menutup diri dari perjanjian kerja sama MLA;

- 3) Pemberantasan korupsi berbasis pada efektifitas dan efisiensi masih dihadapkan pada putusan pengadilan yang belum memberikan efek jera karena belum konsisten mengadili korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan masih adanya fenomena intervensi kekuatan politik dalam melindungi perilaku koruptif;
- 4) Komitmen pemerintah dalam perlindungan WNI di luar negeri belum optimal antara lain mengalami kendala dalam Koordinasi, Integrasi, Simplikasi, dan Sinkronisasi (KISS) antar pemangku otoritas terkait dan pengawasan aktivitas ilegal TKI ke luar negeri;
- 5) Optimalisasi pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam masih mengalami hambatan dalam pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, masih adanya tarik menarik kepentingan antar institusi vertical; dan
- 6) Optimalisasi pemberantasan narkoba masih mengalami hambatan karena belum terbangunnya pemahaman yang sama terhadap implementasi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kelambatan penerbitan dasar hukum pelarangan untuk pemberantasan jenis produk yang dikategorikan narkoba, belum samanya persepsi tentang rehabilitasi pengguna narkoba serta belum efektifnya sistem sanksi hukum terhadap pengguna, pengedar, dan penegak hukum yang terlibat dalam pemakaian dan peredaran narkoba.

c. Keamanan

Potensi

- 1) Penguatan kelembagaan TNI-Polri mulai pusat sampai dengan daerah, didukung infrastruktur memperkuat potensi pengelolaan keamanan dalam negeri dan keamanan ketertiban nasional serta meningkatnya kesadaran dan dukungan masyarakat dalam membantu pemberantasan terorisme;
- 2) Komitmen pemerintah dalam pembangunan untuk semua termasuk didalamnya daerah perbatasan, didukung pembangunan infrastruktur, optimalisasi pengawasan keamanan di perbatasan, dan intensitas kerja sama dengan negara tetangga;
- 3) Komitmen pemerintah dalam optimalisasi pengelolaan SDA kelautan antara lain pemberantasan *illegal fishing* sesuai: (a) Ketentuan FAO mengenai *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF); (b) Pembentukan *Regional Plan of Action* (RPOA) di wilayah ASEAN dan Australia; (c) Terbentuknya Satgas 115 untuk pemberantasan IUU *fishing* secara terpadu didukung oleh penguatan armada pengawasan wilayah laut yurisdiksi nasional;
- 4) Komitmen pemerintah dalam mempersiapkan pelaksanaan tugas fungsi FIR yang semula dikelola oleh Singapura antara lain terkait terbukanya peluang Pemerintah Indonesia untuk mengambil kewenangan pengelolaan wilayah udara sejauh memenuhi aturan internasional (*International Civil Aviation Organization/ICAO*), penyiapan penguasaan teknologi pengendalian lalu lintas udara, kepercayaan lembaga penerbangan internasional terhadap manajemen keselamatan penerbangan Indonesia, peningkatan kualitas SDM seiring dengan kemajuan pendidikan dan teknologi;
- 5) Penyelesaian masalah Papua difokuskan pada konsistensi kebijakan afirmatif bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam

pengelolaan pemerintahan dan pembangunan SDM-OAP di Papua dan Papua Barat, berlanjutnya pembangunan infrastruktur yang signifikan di Papua untuk peningkatan kesejahteraan dalam rangka membangun kesadaran masyarakat lokal terhadap kehidupan nasional Indonesia, semakin berkurangnya internasionalisasi pemecahan masalah dalam negeri Indonesia di Papua; dan

- 6) Optimalisasi bantuan kekuatan TNI-Polri dalam *quick responses* terhadap bencana berbasis pada jiwa kejuangan yang terpatri pada kesatuan TNI-Polri yang sudah terbiasa dengan medan sulit.

Permasalahan

- 1) Berkembangnya pemahaman agama secara sempit yang menganggap cara-cara teror sebagai jihad agama, diperkuat dengan adanya pemanfaatan teknologi digital dan hasutan ketimpangan dalam kehidupan sosial untuk propaganda ajaran radikal;
- 2) Pengelolaan wilayah perbatasan (darat, laut, dan udara) masih dihadapkan pada ketergantungan komitmen pengamanan bersama, kepentingan nasional negara tetangga, keterbatasan sumber daya dan anggaran dalam pengelolaan bentang wilayah perbatasan negara yang dapat menjadi pintu masuk kegiatan ilegal serta masih adanya keterbatasan KISS dalam pemantauan aktivitas *illegal fishing* dalam wilayah laut yurisdiksi nasional;
- 3) Penyelesaian kepastian perbatasan antarnegara masih dihadapkan pada belum terbangunnya kesamaan persepsi dengan negara tetangga tertentu terhadap UNCLOS 1982, belum mantapnya kesepakatan regional tentang wilayah laut yurisdiksi nasional dengan negara tetangga;
- 4) Persiapan pengambilalihan FIR dari Singapura masih menghadapi masalah belum terpilihnya Indonesia sebagai

Anggota Dewan ICAO, belum adanya rekomendasi dari ICAO kepada Indonesia dalam pengelolaan penerbangan sipil pada seluruh wilayah udara yurisdiksi nasional Indonesia karena belum terpenuhinya persyaratan ICAO;

- 5) Penyelesaian damai masalah Papua masih dihadapkan pada terbatasnya sosialisasi dan pemahaman OAP terhadap proses ilegal integrasi Papua ke dalam NKRI, masih rendahnya kualitas SDM-OAP dalam memahami makna negara kesatuan dan manfaat Pemerintah RI dalam percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua; dan
- 6) Realisasi penanggulangan kebencanaan masih menghadapi masalah belum tegasnya sistem, doktrin, status, dan dukungan logistik dalam pelaksanaan tugas OMSP TNI pada proses mitigasi dan penanggulangan bencana nasional, belum terlatihnya masyarakat dalam mewaspadaai kemungkinan bencana sesuai kearifan lokal dan respon cepat menghadapi peristiwa bencana serta belum terbangunnya kesigapan lembaga daerah dalam *quick response* terhadap penanggulangan bencana.

d. Ekonomi

Potensi

- 1) Pengembangan produksi dan kegiatan ekonomi lainnya di berbagai wilayah, membuka peluang berkembangnya mobilitas manusia, barang, dan perluasan sarana transportasi multiguna;
- 2) Penguatan MDA dalam pembangunan kemaritiman dihadapkan pada luasnya laut Indonesia dibanding daratan beserta kekayaan di dalamnya, membuka peluang pembangunan sarana transportasi laut yang lebih efisien dan murah;

3) Pertumbuhan . . .

- 3) Pertumbuhan sektor jasa formal telah melebihi pertumbuhan ekonomi nasional membuka peluang peningkatan sektor jasa informal untuk memperoleh standar kualifikasi/sertifikasi;
- 4) Penguatan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,5%, didukung oleh penguatan seluruh sektor ekonomi nasional;
- 5) Percepatan pemerataan dan keadilan, keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat untuk memenuhi amanat UUD NRI 1945;
- 6) Percepatan pembangunan poros maritim dunia dan tol laut berbasis pada transportasi multimoda dan pembudayaan *Maritime Domain Awareness* (MDA), didukung oleh pendayagunaan tol langit yang baru diluncurkan; dan
- 7) Posisi dan kondisi geografis yang beragam dan berada pada posisi *ring of fire*, merupakan wilayah yang berpotensi wisata, sumber kekayaan alam.

Permasalahan

- 1) Peningkatan kebutuhan devisa untuk pembiayaan pembangunan dan masih besarnya ketergantungan pada ekspor komoditi primer serta semakin besarnya defisit perdagangan, merupakan kendala dalam peningkatan dinamika dan pertumbuhan ekonomi nasional;
- 2) Produktivitas industri manufaktur domestik cenderung menurun (deindustrialisasi prematur), karena instrumen pendukung industri sebagian besar *obsolete*, merupakan kendala bagi ekspor produk komoditas Indonesia oleh barang primer dan belum didukung oleh produk olahan sehingga kurang memiliki nilai tambah ekonomi; dan
- 3) Posisi dan kondisi geografis yang berada pada posisi *ring of fire* merupakan kendala untuk penyiapan mitigasi, resiko bencana, dengan konsekuensi ekonomi yang tidak murah.

e. Sosial Budaya

Potensi

- 1) Peningkatan kesadaran akan keunggulan budaya Indonesia yang beraneka ragam, merupakan peluang untuk mengembangkan program pendidikan berkarakter dan budi pekerti baik formal maupun nonformal;
- 2) Posisi dan kondisi geografis pada *ring of fire*, merupakan peluang untuk mengembangkan berbagai kekayaan sosial dan budaya;
- 3) Pengamalan nilai agama sesuai hakikat untuk menciptakan kedamaian umat manusia merupakan peluang untuk memperkuat demokrasi dan konsolidasi politik;
- 4) Peningkatan angka kelahiran atau *baby booming*, dan peningkatan angka harapan hidup, merupakan peluang untuk memperoleh angkatan kerja produktif;
- 5) Peningkatan kualitas SDM sesuai dengan konsep pembangunan infrastruktur SDM didukung oleh pendayagunaan *e-learning* dan pendidikan vokasi; dan
- 6) Penanggulangan kesenjangan antarwilayah dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan pembangunan wilayah 3T.

Permasalahan

- 1) Percepatan reformasi birokrasi pemerintahan, masih dihadapkan pada kebiasaan birokrasi lama, merupakan kendala karena rawan praktik KKN, *paper work*, dan rantai layanan yang panjang;
- 2) Posisi dan kondisi geografis pada *ring of fire*, menjadi kendala dalam merumuskan program pembangunan sosial dan budaya dan posisi *remote area* membutuhkan sarana komunikasi, transportasi yang mampu menjangkau wilayah tersebut; dan
- 3) Penurunan pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila pada sebagian kalangan generasi muda dan/atau sivitas akademika, merupakan kendala bagi peningkatan kualitas

politik nasional agar tetap sesuai dengan demokrasi Pancasila dan mendorong peningkatan pemahaman generasi milenial.

Selain berbagai permasalahan dan tantangan di atas, Indonesia juga pada pergeseran tren pertahanan ditunjukkan dengan adanya proliferasi persenjataan dan eskalasi ancaman perang nonkonvensional. Untuk menghadapi ancaman perang nonkonvensional, Indonesia secara bertahap mengadopsi konsep keamanan insani (*human security*). Keamanan tidak lagi direduksi menjadi keamanan negara dan dimonopoli oleh aparat tertentu, namun keamanan nasional kini bersifat lebih komprehensif, misalnya mencakup keamanan pangan dan energi. Dengan demikian, keamanan nasional juga menjadi semakin partisipatif karena melibatkan berbagai institusi (sebagai contoh, dalam menyelesaikan masalah Papua saat ini dibutuhkan sinergitas dan soliditas berbagai aktor seperti TNI, Polri, BIN, Imigrasi, Ekonomi, Sosial Budaya, Akademisi, dan lain-lain). Kemampuan dan peran lembaga-lembaga keamanan nasional dalam merumuskan dan mengintegrasikan kebijakan di bidang keamanan nasional masih lemah akibat dari kurangnya kerja sama dan koordinasi antar institusi.

Dalam perspektif keamanan nasional, muncul potensi ancaman yang semakin variatif dan multidimensional sehingga memerlukan pengelolaan keamanan nasional oleh lembaga-lembaga terkait secara lebih terintegrasi, efektif, dan efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan Dewan Keamanan Nasional yang mampu merumuskan kerangka kebijakan keamanan nasional yang terintegratif. Amanat Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, terdapat rencana pembentukan DKN yang sampai saat ini masih belum terwujud. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang telah ada, diharapkan dapat mempercepat perwujudan DKN.

1.2.3 Analisa Lingkungan Strategis (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats/SWOT*)

Berbagai dinamika lingkungan strategis di atas perlu disikapi oleh Wantannas agar dapat menjadi suatu peluang, bukan ancaman yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional. Oleh karena itu, Wantannas sebagai Lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan ketahanan nasional perlu meningkatkan peran dan fungsinya dengan menjadikan pengaruh lingkungan strategis tersebut sebagai dasar untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan melalui analisa SWOT. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menentukan arah strategi dan kebijakan Wantannas ke depan agar tujuan dan sasaran organisasi Wantannas dalam Renstra Periode 2020-2024 dapat terwujud. Adapun hasil rangkuman analisa SWOT tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3
ANALISIS SWOT

SWOT	HASIL PEMBAHASAN	
1	2	
<i>Strengths</i> (Kekuatan)	1	Dukungan dan kepercayaan masyarakat dan lembaga
	2	Tugas dan fungsi Wantannas yang sangat strategis
	3	Arahan Presiden tentang penguatan Wantannas untuk bela negara
	4	Koordinator aksi nasional Bela Negara
	5	Memiliki sistem informasi yang memadai
	6	Memiliki kredibilitas dalam pengabdian sejak berdirinya NKRI
	7	Kualitas SDM yang memadai
<i>Weaknesses</i> (Kelemahan)	1	Pembinaan ketahanan nasional belum terukur
	2	Belum terbentuknya Dewan Keamanan Nasional
	3	Keppres 101 tahun 1999 tentang Wantannas dan Setjen Wantannas sudah tidak relevan
	4	Belum optimalnya koordinasi dengan anggota Dewan
	7	Manajemen kinerja yang belum optimal
	8	Terbatasnya anggaran
	9	Belum terealisasi pelaksanaan Sidang Dewan
	10	Belum adanya Inspektorat

1	2	
	11	Belum adanya peraturan terkait Pedoman Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal
	12	Jumlah SDM yang belum memadai
<i>Opportunities</i> (Kesempatan)	1	Belum adanya alat ukur tentang pembinaan ketahanan nasional
	2	Negara dengan tatanan politik yang lebih demokratis
	3	Reformasi birokrasi terus berjalan untuk memperbaiki kualitas layanan publik
	4	Koordinasi antarsektor dan antardaerah dalam pembangunan daerah
	5	Desentralisasi dan Otonomi Daerah
	6	Rencana perubahan menjadi Dewan Keamanan Nasional
	7	RPJMN mengamanatkan adanya rencana aksi Bela Negara
<i>Threats</i> (Ancaman)	1	Belum ditetapkannya peraturan perundangan tentang Rencana Aksi Bela Negara
	2	Beberapa Intansi Pemerintah juga menyusun kajian rekomendasi kebijakan kepada Presiden
	3	Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional belum disahkan
	4	<i>Belt Road Initiative</i> dari Tiongkok
	5	Polarisasi pusat geopolitik baik di Barat (Amerika dan Eropa) maupun di Kawasan Timur (Asia)

Berdasarkan hasil Analisis SWOT tersebut, maka untuk menghadapi kondisi lingkungan strategis yang semakin kompleks, Wantannas perlu memanfaatkan seluruh kekuatan dan peluang yang ada untuk meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman atau risiko yang akan dihadapi, melalui:

- a. Merevisi Keppres 101 tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
- b. Merumuskan kembali sasaran strategis dan indikator kinerja Wantannas dan Setjen Wantannas disesuaikan dengan tupoksi, visi, dan misi Presiden;
- c. Mempercepat pengesahan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Dewan Keamanan Nasional;
- d. Mempercepat pengesahan Undang-Undang Keamanan Nasional;

e. Mengoptimalkan . . .

- e. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Nasional, dengan menyelenggarakan Sidang Dewan;
- f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Wantannas dan Setjen Wantannas; dan
- g. Memperkuat pembinaan Ketahanan Nasional melalui penetapan kebijakan dan strategi, pengukuran dan pemantauan kondisi kehidupan dan pembangunan nasional serta aksi Bela Negara secara terstruktur, sistematis dan masif.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN WANTANNAS

2.1 VISI WANTANNAS

Dalam rangka mewujudkan Indonesia maju, Presiden menetapkan visi:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.

Untuk mendukung visi tersebut Presiden menetapkan misi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada visi dan misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden. Untuk itu perumusan visi dan misi Dewan Ketahanan Nasional disusun dengan menyelaraskan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

“Dewan Ketahanan Nasional yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

2.2 MISI WANTANNAS

Dewan Ketahanan Nasional melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden ke : (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan; (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga; dan (8) Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana lembaga Dewan Ketahanan Nasional.

2.3 TUJUAN WANTANNAS

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, Wantannas telah menetapkan beberapa tujuan yang akan dicapai dalam 5 tahun ke depan. Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketetapan kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka kelangsungan hidup bangsa dan negara;
2. Terselenggaranya kapasitas pelayanan kelembagaan Wantannas yang efektif dan efisien; dan
3. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya.

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk ketiga tujuan tersebut di atas, dijelaskan dalam sasaran strategis.

2.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis yang ditetapkan harus merupakan ukuran pencapaian dari tujuan Wantannas dan Setjen Wantannas, dan merupakan *outcome* dari semua program. Sasaran strategis ditujukan untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Oleh sebab itu, Wantannas menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terbinanya . . .

1. Terbinanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong; dan
2. Terwujudnya pelayanan Wantannas yang efektif dan efisien.

Sesuai dengan sasaran strategis di atas, maka untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis pertama: *“Terbinanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”*, terdapat indikator sebagai berikut:

1. Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang disiapkan untuk bahan Sidang Dewan;
2. Persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang ditindaklanjuti;
3. Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur pembangunan nasional yang dilaporkan;
4. Persentase rancangan kebijakan untuk mengukur kondisi kehidupan nasional yang dilaporkan; dan
5. Persentase rancangan kebijakan dan strategi aksi Bela Negara dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang dilaporkan.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis kedua: *“Terwujudnya Wantannas yang efektif dan efisien”*, terdapat indikator sebagai berikut:

1. Indeks RB;
2. Nilai SAKIP;
3. Opini BPK; dan
4. Jumlah penyelenggaraan Sidang Dewan.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden, pemerintah menetapkan tujuh Agenda Pembangunan Nasional/Prioritas Nasional yang tercantum dalam RPJMN, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan layanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi layanan publik.

Dalam rangka Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan yang tertuang dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional, Wantannas ditugaskan melaksanakan indikator rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan aksi bela negara pada Pro PN Pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewargaan, nilai-nilai kebangsaan, dan bela negara, melalui (PP) Revolusi Mental dan Pembinaan ideologi Pancasila dengan Kegiatan Prioritas (KP) Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Selain itu dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi dalam pembinaan ketahanan nasional, Wantannas akan mengarahkan program dan kegiatannya untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) memperkuat stabilitas Polhukhankam dan tranformasi layanan publik.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI WANTANNAS DAN SETJEN WANTANNAS

Berdasarkan hasil Analisa SWOT dan Prioritas Pembangunan Nasional, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Wantannas periode 2020-2024 adalah:

1. Arah kebijakan dan strategi Wantannas:

Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan: Meningkatkan kualitas pembinaan ketahanan nasional melalui penetapan pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis serta penetapan kebijakan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis.

Strategi:

- a. Penyelenggaraan pembinaan ketahanan nasional; dan
- b. Penetapan kebijakan Ketahanan Nasional melalui Sidang Dewan.

2. Arah kebijakan dan strategi Setjen Wantannas:

Arah kebijakan: Meningkatkan kualitas kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional di Bidang Pengkajian dan Penginderaan.

Strategi:

- a. Penyelenggaraan analisis dan pengkajian lingkungan strategi nasional;
- b. Penyelenggaraan analisis dan lingkungan strategis regional;
- c. Penyelenggaraan analisis dan pengkajian lingkungan strategi internasional;
- d. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta baik dalam negeri dan luar negeri dalam rangka menyusun bahan kebijakan; dan
- e. Penyusunan Perkiraan Strategi Nasional (Kristanas), Telaahan Strategi Nasional (Terstranas), dan rancangan Apresiasi Strategi Nasional (Apstranas).

Arah kebijakan: Meningkatkan kualitas kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional di bidang Sistem Nasional.

Strategi:

- a. Perumusan sistem pengelolaan negara;
- b. Perumusan sistem pengelolaan lingkungan alam;
- c. Perumusan sistem pengelolaan lingkungan sosial;
- d. Perumusan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi aktual dalam rangka mendukung Wantannas;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta baik dalam negeri dan luar negeri dalam rangka menyusun bahan kebijakan; dan
- f. Pemantauan kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional.

Arah kebijakan: Meningkatnya kualitas kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional di bidang Politik dan Strategi.

Strategi:

- a. Penyelenggaraan evaluasi, analisis, dan perumusan politik nasional;
- b. Pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan strategi nasional dalam rangka pemecahan masalah pembangunan nasional;
- c. Pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan rencana kontinjensi dalam rangka menghadapi krisis nasional;
- d. Penyusunan perkiraan batas toleransi resiko pembangunan nasional;
- e. Pemantauan kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; dan
- f. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta baik dalam negeri dan luar negeri dalam rangka menyusun bahan kebijakan.

Arah kebijakan: Meningkatnya kualitas kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional di bidang Pengembangan.

Strategi:

- a. Pengamatan, evaluasi, analisis dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek ekonomi serta perumusan saran pemecahan

krisis ekonomi dan saran pemecahan masalah penyimpangan pembangunan ekonomi yang terjadi;

- b. Pengamatan, evaluasi, analisis dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek sosial budaya serta saran pemecahan masalah sosial budaya;
- c. Pengamatan, evaluasi, analisis dinamika dan pelaksanaan pembangunan aspek hukum dan Perundang-undangan serta perumusan saran pemecahan penegakan hukum;
- d. Pengamatan, evaluasi, analisis dinamika dan pelaksanaan pembangunan, perumusan saran pemecahan masalah, saran pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional aspek hankam yang terjadi dan mobilisasi sumber daya nasional;
- e. Pengukuran kondisi kehidupan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;
- f. Pengukuran hasil pembangunan nasional melalui pemantauan pembangunan nasional yang berkelanjutan; dan
- g. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta baik dalam negeri dan luar negeri dalam rangka menyusun bahan kebijakan.

Arah kebijakan: Meningkatkan kualitas kebijakan dan strategi pembinaan ketahanan nasional di bidang keahlian tertentu.

Strategi:

- a. Pengamatan, penelaahan, memberikan pertimbangan, dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai ekonomi kerakyatan yang berkaitan dengan ketahanan nasional;
- b. Pengamatan, penelaahan, memberikan pertimbangan, dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai dinamika masyarakat yang plural dan heterogen yang berkaitan dengan ketahanan nasional;
- c. Pengamatan, penelaahan, memberikan pertimbangan, dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai hukum ketatanegaraan yang berkaitan dengan ketahanan nasional;

d. Pengamatan . . .

- d. Pengamatan, penelaahan, memberikan pertimbangan, dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai pemamfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan yang berkaitan dengan ketahanan nasional; dan
- e. Pengamatan, penelaahan, memberikan pertimbangan, dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang berkaitan dengan ketahanan nasional.

Arah kebijakan: Meningkatkan kualitas layanan dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Strategi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dan protokol, kepegawaian dan hukum, serta perlengkapan;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran, penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan keuangan; dan
- c. Pengelolaan persidangan Wantannas, hubungan masyarakat, hubungan kelembagaan, hubungan media publikasi, dokumentasi dan layanan perpustakaan, pengelolaan sistem informasi, serta pengawasan internal.

Arah kebijakan: Melaksanakan pembinaan ketahanan nasional.

Strategi: Pelaksanaan perumusan kebijakan dan evaluasi aksi Bela Negara.

3.3 KERANGKA REGULASI

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan kapasitas ketahanan nasional dan stabilitas keamanan dibutuhkan kerangka regulasi Dewan Ketahanan Nasional sebagai berikut:

Tabel 4
Kerangka Regulasi Sasaran Strategis
Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Nasional

No	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi
1	2	3	4
1	Terbinanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Keppres 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	a. Revisi Keppres 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; b. UU Kamnas; c. Perpres terkait Dewan Keamanan Nasional; dan d. Inpres terkait Bela Negara.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

3.4.1 Peran, Tugas, dan Fungsi Wantannas

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dijelaskan bahwa Wantannas adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Wantannas. Wantannas bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam menyelenggarakan tugas, Wantannas mempunyai fungsi: (a) penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional Indonesia; (b) penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara; (c) penetapan risiko pembangunan nasional yang dihadapi untuk kurun waktu tertentu dan pengalokasian sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara dalam rangka merehabilitasi akibat dari risiko pembangunan. Pada praktiknya, Wantannas masih belum optimal dalam melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya sebagai Lembaga pemerintah terutama dalam penetapan kebijakan ketahanan nasional yang diputuskan melalui Sidang Dewan.

3.4.2 Struktur . . .

3.4.2 Struktur Organisasi Wantannas

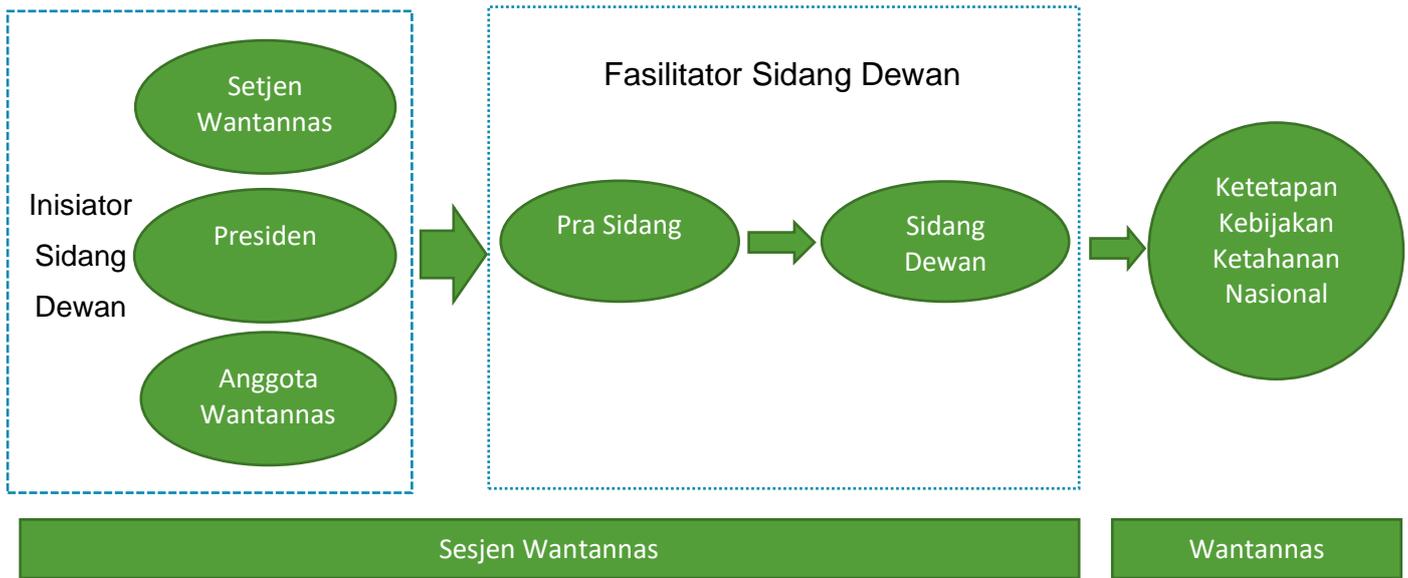
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, Wantannas memiliki struktur organisasi, sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Nasional

- Ketua Dewan : Presiden Republik Indonesia
- Sekretaris Dewan : Sekretaris Jenderal Wantannas merangkap anggota
- Anggota Dewan : 1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Luar Negeri;
9. Menteri Pertahanan;
10. Menteri Komunikasi dan Informasi;
11. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Panglima TNI;
13. Kapolri;
14. Kepala Badan Intelijen Negara; dan
15. Anggota tambahan dapat ditunjuk sesuai kebutuhan.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional disebutkan bahwa dalam menetapkan rancangan kebijakan dan strategi nasional, Dewan Ketahanan Nasional melakukan Sidang Dewan dengan para anggota tetap maupun tidak tetap paling sekurang kurangnya 3 bulan sekali.

Tata Kerja Sidang Dewan menurut SOTK Setjen Wantannas:



3.4.3 Peran, Tugas, dan Fungsi Setjen Wantannas

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dijelaskan bahwa Setjen Wantannas adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden selaku Ketua Wantannas, dan berperan dalam pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Dalam menjalankan peran tersebut, Setjen Wantannas mempunyai tugas merumuskan rancangan kebijakan dan strategi nasional untuk menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam menyelenggarakan tugas, Setjen Wantannas mempunyai fungsi: (a) perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional; (b) perumusan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka menjamin keselamatan bangsa dan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan-kesatuan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara; (c) penyusunan perkiraan risiko pembangunan nasional yang

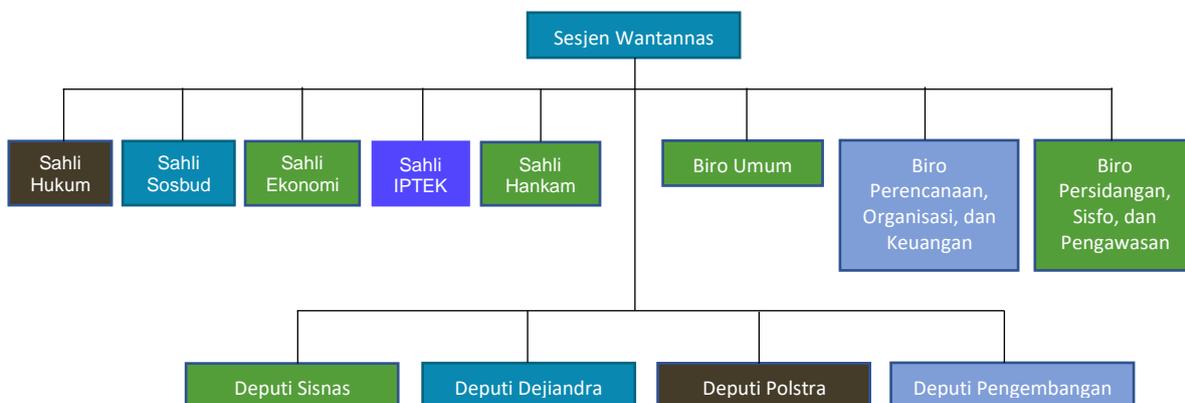
dihadapi . . .

dihadapi dalam kurun waktu tertentu dan rancangan ketetapan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka merehabilitasi akibat risiko pembangunan.

3.4.4 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, telah disusun struktur organisasi Setjen Wantannas berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 1.1101.30013101 tanggal 31 Januari 2000 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Secara garis besar struktur organisasi Setjen Wantannas, sebagai berikut:

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional



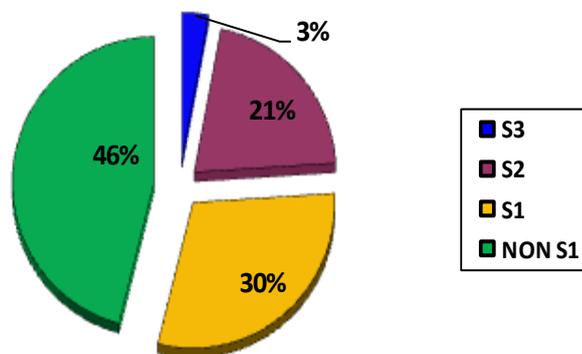
Organisasi Setjen Wantannas terdiri dari 9 unit kerja eselon I, yaitu: Kedeputian Bidang Sistem Nasional; Kedeputian Bidang Pengkajian dan Penginderaan; Kedeputian Bidang Politik dan Strategi; Kedeputian Bidang Pengembangan; Staf Ahli Bidang Sosial Budaya; Staf Ahli Bidang Ekonomi; Staf Ahli Bidang Pertahanan Keamanan; Staf Ahli Bidang Hukum; dan Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan, Organisasi Setjen Wantannas terdiri dari 3 unit kerja eselon II, yaitu Biro Umum; Biro Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan; dan Biro Persidangan,

Sistem . . .

Sistem Informasi dan Pengawasan.

Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Maret 2020, kekuatan sumber daya manusia Setjen Wantannas adalah sebanyak 195 orang, terdiri atas 90 pegawai organik, 67 pegawai perbantuan, 7 pegawai diperbantukan, dan 32 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. Dari sejumlah itu 7 orang (3%) diantaranya berpendidikan doktor; 40 orang (21%) magister; 59 orang (30%) sarjana; 89 orang (46%) sarjana muda/D3, SLTA, dan SLTP/SD sebagaimana Gambar 2 dan Tabel 5. Dari jumlah pegawai tersebut, terdapat 102 orang pegawai yang menduduki jabatan struktural dan sisanya sebanyak 63 orang sebagai tenaga fungsional.

Gambar 2
Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



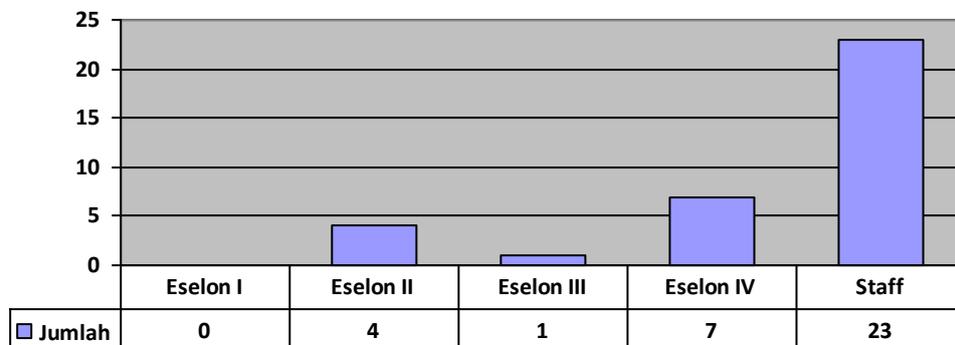
Perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis menuntut Setjen Wantannas untuk meningkatkan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM dalam menghadapi lingkungan strategis tersebut. Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pegawai Setjen Wantannas diikutkan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diklat tersebut berupa diklat penjenjangan, baik struktural, dan diklat fungsional teknis maupun diklat substansi yaitu diklat yang dirancang untuk menunjang keahlian dan menambah wawasan di bidang yang terkait dengan sektor bidang tugasnya.

Tabel 5
Profil Sumber Daya Dewan Ketahanan Nasional

NO	NAMA JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN				JUMLAH
		S3	S2	S1	NON S1	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pejabat Negara	-	1	-	-	1
2	Eselon Ia	2	2	-	-	4
3	Eselon Ib	1	3	1		5
4	Eselon IIa	2	26	12	8	50
5	Eselon IIb	1	2	1	1	5
6	Eselon III	-	5	3	1	9
7	Eselon IV	1	1	9	17	28
8	Fungsional Umum	-	-	33	30	63
9	Pengemudi	-	-	-	10	10
10	Pengamanan Dalam	-	-	-	6	6
11	Tenaga Kebersihan	-	-	-	11	11
12	Pramubakti	-	-	-	5	5
Jumlah Total		7	40	59	89	195

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Hukum Biro Umum

Dalam rangka mendukung pengarusutamaan gender (PUG) yang tertuang pada RPJMN 2020-2024, dalam Struktur Organisasi Setjen Wantannas terdapat beberapa kedudukan jabatan Eselon II hingga Eselon IV yang dijabat oleh perempuan, diantaranya sebagai berikut:



Untuk mewujudkan sasaran strategis diperlukan peningkatan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi baik internal maupun eksternal dalam pengelolaan sumber daya manusia dari segi

kualitas maupun kuantitas, oleh karena itu Dewan Ketahanan Nasional merumuskan dalam sebuah kerangka kelembagaan sebagai berikut:

Tabel 6
Kerangka Kelembagaan Sasaran Strategis
Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Nasional

No	Sasaran Strategis	Kelembagaan Terkait yang Sudah Ada	Kerangka Kelembagaan
1	Terbinanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	a. Pembentukan Dewan Keamanan Nasional; b. Penguatan Organisasi dan ketatalaksanaan Wantannas dan Setjen Wantannas; c. Penguatan Fungsi Pengawasan Internal; dan d. Peningkatan kualitas SDM.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Capaian kinerja Wantannas dan Setjen Wantannas diukur berdasarkan capaian sasaran strategis, capaian program dan capaian kegiatan. Indeks capaian setiap IKU, IKP, dan IKK ditetapkan berdasarkan skala ordinal, dimana interpretasi kesimpulan maksimal dikatakan Sangat Berhasil jika melebihi presentasi 100% dan paling rendah tidak berhasil jika kurang dari 30%. Rincian capaiannya sebagai berikut:

NO	SKALA NILAI ORDINAL	INTEPRETASI KESIMPULAN
1	2	3
1	≥100%	Sangat Berhasil
2	80% – 100%	Berhasil
3	70% – 79,99%	Cukup Berhasil
4	30% – 69,99%	Kurang Berhasil
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil

$$\text{Rumus pencapaian} = \frac{\text{Total Pencapaian}}{\text{Target yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Sasaran strategis, Program dan kegiatan Setjen Wantannas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka target sesuai dengan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Terbinanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang disiapkan untuk bahan Sidang Dewan	-	80%	80%	80%	80%
	Persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang ditindaklanjuti	-	80%	80%	80%	80%
	Persentase saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional yang dilaporkan	-	85%	85%	85%	85%
	Persentase saran tindak hasil pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dilaporkan	-	85%	85%	850%	85%
	Persentase rumusan kebijakan dan strategi aksi Bela Negara dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang dilaporkan	85%	85%	85%	85%	85%
Terwujudnya pelayanan Wantannas yang efektif dan efisien	Indeks RB	B	B	BB	BB	BB
	Nilai SAKIP	70	75	80	85	90
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Jumlah penyelenggaraan Sidang Dewan	-	2	3	4	4

Tabel 8
Program Teknis

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional	Terumuskannya rancangan Kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional yang tangguh dan dinamis	Persentase rancangan kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional yang disiapkan untuk bahan prasidang	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase saran tindak hasil penginderaan nasional, regional, dan internasional yang dikirim ke Presiden	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase Kajian kerjasama bidang lingkungan strategis yang dikirim ke Presiden	85%	85%	85%	85%	85%
	Terumuskannya rancangan Kebijakan sistem nasional yang tangguh dan dinamis	Persentase rancangan kebijakan sistem nasional yang disiapkan untuk bahan prasidang	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional dikirim ke Presiden	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase Kajian kerjasama bidang sistem nasional yang dikirim ke Presiden	85%	85%	85%	85%	85%

Terumuskannya . . .

1	2	3	4	5	6	7	8
	Terumuskannya rancangan Kebijakan politik, strategi nasional dan rencana kontinjensi yang tangguh dan dinamis	Persentase rancangan kebijakan politik strategi nasional dan rencana kontinjensi yang disiapkan untuk bahan prasidang	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase perumusan Perkiraan Batas Toleransi Resiko Pembangunan yang disiapkan untuk bahan masukan pengambilan keputusan	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase Kajian kerjasama bidang politik dan strategi yang dikirim ke Presiden	85%	85%	85%	85%	85%
	Terumuskannya hasil pengukuran pembangunan nasional dan kondisi kehidupan nasional serta kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional yang tangguh dan dinamis	Persentase rancangan kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional yang disiapkan untuk bahan prasidang	80%	80%	80%	80%	80%

Persentase . . .

1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan penyimpangan pembangunan nasional yang dikirim ke Presiden	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase saran tindak hasil pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase kajian kerjasama bidang pengembangan ketahanan yang dikirim ke Presiden	85%	85%	85%	85%	85%
	Terumuskannya Kebijakan Terkait Keahlian Tertentu yang Tangguh dan dinamis	Persentase rancangan kebijakan aksi Bela Negara untuk pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang disiapkan	85%	85%	85%	85%	85%
		Persentase rancangan saran kebijakan ketahanan nasional terkait yang keahlian tertentu yang disiapkan bahan masukan pengambilan keputusan pimpinan	85%	85%	85%	85%	85%

Tabel 9 . . .

Tabel 9
Program Generik

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Dukungan Manajemen	Terkelolanya Perencanaan, Organisasi dan Keuangan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Jumlah Layanan yang dihasilkan pada bagian Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan	5	6	6	6	6
		Opini BPK atas LK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai RB Wantannas	B	B	BB	BB	A
		Nilai SAKIP	70	75	80	85	90
	Terwujudnya dukungan internal perkantoran yang berkualitas dan berkinerja tinggi	Jumlah Layanan yang dihasilkan pada bagian Kepegawaian, Perlengkapan dan TUP	5	7	7	7	7
		Kategori kualitas pengelolaan BMN	3	2	2	2	2
		Indeks Hasil Pengawasan Arsip	B	B	B	B	B
		Indeks Profesionalitas ASN	70	75	80	82	85
	Terkelolanya Layanan persidangan, sistem informasi dan Pengawasan internal yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi	Jumlah layanan yang dihasilkan pada bagian Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal	3	4	4	4	4
		Maturitas SPIP	3	4	4	4	4
		Peringkat Keterbukaan Informasi Publik	C.I	M.I	M.I	M.I	I

1	2	3	4	5	6	7	8
		Peringkat Keamanan Informasi (KAMI) K/L	6	5	5	5	4
		Persentase Sidang Dewan yang terlaksana	-	50%	50%	75%	75%

Tabel 10
Kegiatan Prioritas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional Terkait Keahlian Tertentu	Penguatan Ketahanan Nasional	Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan aksi Bela Negara	1	4	4	4	4

Tabel 11
Kegiatan Deputi Pengkajian dan Penginderaan

Kegiatan Teknis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Nasional	Terumuskannya Kirstranas, Telstranas, dan Apstranas lingkungan strategis nasional	Jumlah Kirstranas, Telstranas, dan Apstranas lingkungan strategis nasional yang dihasilkan	2	2	2	2	2
	Terumuskannya saran tindak hasil penginderaan lingkungan strategis nasional	Jumlah saran tindak penginderaan lingkungan strategis nasional yang dihasilkan	3	3	6	9	9
	Terumuskannya kajian kerja sama bidang lingkungan strategis nasional	Jumlah kajian kerjasama bidang lingkungan strategis nasional yang dihasilkan	1	1	2	3	3

1	2	3	4	5	6	7	8
Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Regional	Terumuskannya Kirstranas, Telstranas, dan Apstranas kajian lingkungan strategis regional	Jumlah Kirstranas, Telstranas, dan Apstranas lingkungan strategis regional yang dihasilkan	2	2	2	2	2
	Terumuskannya saran tindak hasil penginderaan lingkungan strategis regional	Jumlah saran tindak penginderaan lingkungan strategis regional yang dihasilkan	3	3	6	9	9
	Terumuskannya kajian kerjasama bidang lingkungan strategis regional	Jumlah kajian kerjasama bidang lingkungan strategis regional yang dihasilkan	1	1	2	3	3
Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Internasional	Terumuskannya saran kebijakan lingkungan strategis internasional	Jumlah saran kebijakan lingkungan strategis internasional yang dihasilkan	1	1	2	2	2
	Terumuskannya saran tindak hasil penginderaan lingkungan strategis internasional	Jumlah saran tindak penginderaan lingkungan strategis internasional yang dihasilkan	3	3	6	9	9
	Terumuskannya hasil kajian kerja sama bidang lingkungan strategis internasional	Jumlah kajian kerjasama bidang lingkungan strategis internasional yang dihasilkan	1	1	2	3	3

Tabel 12
Kegiatan Deputi Sistem Nasional

Kegiatan Teknis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Perumusan Kebijakan Lingkungan Alam	Terumuskannya rancangan kebijakan sistem nasional bidang lingkungan alam	Jumlah rancangan kebijakan sistem nasional bidang lingkungan alam yang dihasilkan	2	1	2	2	2

Terumuskannya . . .

1	2	3	4	5	6	7	8
	Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang lingkungan alam	Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang lingkungan alam yang dihasilkan	3	3	6	9	9
	Terumuskannya kajian kerja sama bidang Lingkungan Alam	Jumlah kajian kerjasama bidang Lingkungan Alam yang dihasilkan	1	1	2	3	3
Perumusan Kebijakan Lingkungan Sosial	Terumuskannya rancangan kebijakan sistem nasional bidang lingkungan sosial	Jumlah rancangan kebijakan sistem nasional bidang Lingkungan Sosial yang dihasilkan	2	1	2	2	2
	Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang Lingkungan Sosial	Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang lingkungan Sosial yang dihasilkan	3	3	6	9	9
	Terumuskannya kajian kerja sama bidang Lingkungan Sosial	Jumlah kajian kerja sama bidang Lingkungan Sosial yang dihasilkan	1	1	2	3	3
	Terumuskannya Rancangan kebijakan bidang Pemerintahan Negara	Jumlah Rancangan kebijakan bidang Pemerintahan Negara yang dihasilkan	2	1	2	2	2
Perumusan Kebijakan Pemerintahan Negara	Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional bidang Pemerintahan Negara	Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang Pemerintahan Negara yang dihasilkan	3	3	6	9	9

1	2	3	4	5	6	7	8
	Terwujudnya kajian kerja sama bidang Pemerintahan Negara	Jumlah kajian kerja sama bidang Pemerintahan Negara yang dihasilkan	1	1	2	3	3
Perumusan Kebijakan Informasi dan Pengolahan Data	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang informasi dan pengolahan data	Jumlah rancangan kebijakan informasi dan pengolahan data yang dihasilkan	2	1	2	2	2
	Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional bidang informasi dan pengolahan	Jumlah saran tindak hasil pemantauan pantauan kondisi kehidupan nasional bidang informasi dan pengolahan data yang dihasilkan	2	2	4	6	6
	Terumuskannya kajian kerja sama bidang informasi dan pengolahan data	Jumlah kajian kerja sama bidang informasi dan pengolahan data yang dihasilkan	1	1	2	3	3

Tabel 13
Kegiatan Deputi Politik dan Strategi

Kegiatan Teknis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Perumusan Kebijakan Politik Nasional	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang politik nasional	Jumlah rancangan kebijakan politik nasional yang dihasilkan	1	1	2	2	2
	Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan politik nasional	Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan politik nasional yang dihasilkan	3	3	6	9	9

1	2	3	4	5	6	7	8
Perumusan Kebijakan Strategi Nasional	Terumuskannya kajian kerjasama bidang politik nasional	Jumlah kajian kerjasama bidang politik nasional yang dihasilkan	1	1	2	3	3
	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang strategi nasional	Jumlah rancangan kebijakan bidang strategi nasional yang dihasilkan	1	1	1	1	1
	Terumuskannya saran tindak hasil evaluasi dan batas toleransi resiko pembangunan nasional	Jumlah saran tindak hasil evaluasi dan batas toleransi resiko pembangunan nasional yang dihasilkan	3	3	6	9	9
	Terumuskannya kajian kerjasama bidang strategi nasional	Jumlah kajian kerjasama bidang strategi nasional yang dihasilkan	1	1	2	3	3
Perumusan Kebijakan Bidang Rencana kontinjensi	Terumuskannya rancangan kebijakan bidang perencanaan kontinjensi	Jumlah rancangan kebijakan bidang perencanaan kontinjensi yang dihasilkan	1	1	1	1	1
	Terumuskannya saran tindak hasil identifikasi dan klasifikasi ancaman stabilitas nasional	Jumlah saran tindak hasil identifikasi dan klasifikasi ancaman stabilitas nasional yang dihasilkan	3	3	6	9	9
	Terumuskannya kajian kerjasama bidang perencanaan kontinjensi	Jumlah kajian kerjasama bidang perencanaan kontinjensi yang dihasilkan	1	1	2	3	3

Tabel 14 . . .

Tabel 14
Kegiatan Deputi Pengembangan

Kegiatan Teknis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Perumusan Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-undangan	Terumuskannya rancangan kebijakan hukum dan perundang-undangan	Jumlah rancangan kebijakan bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan	2	1	2	2	2
	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang hukum dan perundang-undangan	Jumlah saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan	3	3	6	9	9
	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang hukum dan perundang-undangan	Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan	3	3	6	9	9
	Terumuskannya kajian kerjasama bidang hukum dan perundang-undangan	Jumlah kajian kerjasama bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan	1	1	2	3	3
Perumusan Kebijakan Bidang ekonomi	Terumuskannya rancangan kebijakan ekonomi	Jumlah rancangan kebijakan ekonomi yang dihasilkan	2	1	2	2	2
	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang ekonomi	Jumlah Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang ekonomi yang dihasilkan	3	3	6	9	9

Terumuskannya . . .

1	2	3	4	5	6	7	8
	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang ekonomi	Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang ekonomi yang dihasilkan	3	3	6	9	9
	Terumuskannya kajian Kerjasama bidang ekonomi	Jumlah kajian kerja sama kerja sama bidang ekonomi yang dihasilkan	1	1	2	3	3
Perumusan Kebijakan Bidang Pertahanan Keamanan	Terumuskannya rancangan kebijakan pertahanan keamanan	Jumlah rancangan kebijakan mobilisasi bidang pertahanan dan keamanan yang dihasilkan	2	1	2	2	2
	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan	Jumlah terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang pertahanan keamanan yang dihasilkan	3	3	6	9	9
	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang pertahanan keamanan	Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang pertahanan keamanan	3	3	6	9	9
	Terumuskannya kajian Kerjasama bidang pertahanan keamanan	Jumlah kajian Kerjasama bidang pertahanan keamanan yang dihasilkan	1	1	2	3	3
Perumusan Kebijakan Bidang sosial budaya	Terumuskannya rancangan kebijakan sosial budaya	Jumlah rancangan kebijakan sosial budaya yang dihasilkan	2	1	2	2	2

Terumuskannya . . .

1	2	3	4	5	6	7	8
	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang sosial budaya	Jumlah terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang sosial budaya yang di hasilkan	3	3	6	9	9
	Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang sosial budaya	Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang sosial budaya yang dihasilkan	3	3	6	9	9
	Terumuskannya kajian kerjasama aspek sosial budaya	Jumlah kajian kerjasama kerja sama aspek sosial budaya yang dihasilkan	1	1	2	3	3

Tabel 15
Kegiatan Staf Ahli

Kegiatan Teknis	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional Terkait Keahlian Tertentu	Meningkatnya kehandalan telaahan, saran, dan pertimbangan serta rekomendasi yang tangguh dan dinamis	Jumlah telaahan, saran, dan pertimbangan serta rekomendasi yang dihasilkan	20	5	5	5	5

Tabel 16
Kegiatan Generik

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Pengelolaan layanan Perencanaan, Organisasi dan Keuangan	Terlaksananya layanan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang berkualitas	Persentase dokumen perencanaan yang dihasilkan di Setjen Wantannas	100	100	100	100	100

Persentase . . .

1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Setjen Wantannas yang terlaksana	100	100	100	100	100
	Terlaksananya layanan organisasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian proses bisnis dan layanan penataan organisasi	100	100	100	100	100
	Terlaksananya layanan keuangan yang berkualitas	Persentase penyerapan anggaran Setjen Wantannas	90	90	90	90	90
		Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan	100	100	100	100	100
	Terlaksananya layanan Reformasi Birokrasi	Nilai Penerapan RB Wantannas	B	B	BB	BB	A
	Terlaksananya layanan perkantoran (gaji)	Persentase pembayaran gaji tepat waktu	100	100	100	100	100
Pengelolaan Persidangan, Sisfo dan Pengawasan	Terlaksananya layanan Persidangan dan Kehumasan	Peringkat keterbukaan informasi publik	C.I	M.I	M.I	M.I	I
		Jumlah Sidang Dewan yang terlaksana	-	2	3	4	4
	Terlaksananya layanan data dan informasi yang optimal	Peringkat Keamanan Informasi (KAMI) K/L	6	5	5	5	4
	Terlaksananya layanan Pengawasan Internal yang berkualitas	Nilai internal Audit <i>Capability Model</i> (IA-CM)	2	2	3	4	4
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	4	4	4	4
		Nilai zona Integritas (ZI)	2	2	3	3	4

1	2	3	4	5	6	7	8
Pengelolaan Internal Perkantoran	Terlaksananya layanan manajemen SDM yang berkualitas	Persentase pelaksanaan layanan manajemen SDM yang berkualitas	100	100	100	100	100
		Indeks Profesionalitas ASN	70	75	80	82	85
	Terlaksananya layanan manajemen BMN yang transparan dan akuntabel	Persentase pelaksanaan layanan manajemen BMN yang transparan dan akuntabel	100	100	100	100	100
		Kategori kualitas pengelolaan BMN	3	2	2	2	2
	Terlaksananya layanan protokoler yang efektif dan efisien	Persentase pelaksanaan layanan protokoler yang efektif dan efisien	100	100	100	100	100
	Terlaksananya layanan umum	Persentase pelaksanaan layanan umum yang handal dan berkualitas	100	100	100	100	100
		Indeks Hasil Pengawasan Arsip	B	B	B	B	B
	Terlaksananya layanan perkantoran yang berkualitas	Persentase layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang berkualitas	100	100	100	100	100

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai Matrik Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan pada RPJMN 2020-2024 dan juga sesuai indikasi pendanaan ideal Wantannas 2020-2024 maka indikasi pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Wantannas periode 2020-2024 terdapat dua versi adalah sebagai berikut:

4.2.1 Kerangka Pendanaan menurut RPJMN 2020-2024

Sesuai Matrik Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan pada RPJMN 2020-2024 maka indikasi pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Wantannas periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikasi Belanja (Rp Milyar)					Pelaksana
	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
Terbinanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	9,7	8	8	8	8	1. Dejiandra 2. Desisnas 3. Depolstra 4. Debang 5. Staf Ahli
Terwujudnya pelayanan Wantannas yang efektif dan efisien	37	42.4	42.4	42.4	42.4	1. Biro POK 2. Biro PSP 3. Biro Umum

Tabel 18
Program Teknis dan Generik

Program	Indikasi Belanja (Rp Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional	9,7	8	8	8	8
Program Dukungan Manajemen	37	42.4	42.4	42.4	42.4
Total	46,7	50,4	50,4	50,4	50,4

Tabel 19
Kegiatan Prioritas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikasi Belanja (Rp Milyar)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional terkait Keahlian Tertentu	Penguatan Ketahanan Nasional	0,3	3,5	3,5	3,5	3,5

Tabel 20
Kegiatan Teknis
Deputi Pengkajian dan Penginderaan

Kegiatan Teknis	Indikasi Belanja (Rp Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Nasional	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Regional	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Internasional	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Tabel 21
Kegiatan Teknis
Deputi Sistem Nasional

Kegiatan Teknis	Indikasi Belanja (Rp Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Perumusan Kebijakan Lingkungan Alam	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Perumusan Kebijakan Lingkungan Sosial	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Perumusan Kebijakan Pemerintahan Negara	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Perumusan Kebijakan informasi dan Pengolahan Data	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4

Tabel 22
Kegiatan Teknis
Deputi Politik dan Strategi

Kegiatan Teknis	Indikasi Belanja (Rp Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Perumusan Kebijakan Politik Nasional	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Perumusan Kebijakan Strategi Nasional	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Perumusan Kebijakan Bidang Rencana kontinjensi	1	0,5	0,5	0,5	0,5

**Tabel 23
Kegiatan Teknis
Deputi Pengembangan**

Kegiatan Teknis	Indikasi Belanja (Rp Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Perumusan Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-undangan	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Perumusan Kebijakan Bidang ekonomi	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Perumusan Kebijakan Bidang Pertahanan Keamanan	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Perumusan Kebijakan Bidang sosial budaya	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

**Tabel 24
Kegiatan Teknis
Staf Ahli**

Kegiatan Teknis	Indikasi Belanja (Rp Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional Terkait Keahlian Tertentu	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

**Tabel 25
Kegiatan Generik**

Kegiatan Generik	Indikasi Belanja (dalam Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Pengelolaan layanan Perencanaan, Organisasi dan Keuangan	25.2	29.2	29.2	29.2	29.2
Pengelolaan Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Pengelolaan Internal Perkantoran	11	12.5	12.5	12.5	12.5

4.2.2 Kerangka Pendanaan menurut Anggaran Ideal Wantannas 2020-2024

Sesuai indikasi pendanaan ideal Wantannas 2020-2024 yang di dasarkan pada Rincian Anggaran Belanja (RAB) Wantannas 2020-2024 dan Standar Biaya Masukan (SBM) yang tertuang pada PMK No. 78/PMK.02/2019 maka indikasi pendanaan untuk mendukung pencapaian

tujuan . . .

tujuan dan sasaran strategis Wantannas periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikasi Belanja (Rp Milyar)					Pelaksana
	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7
Terbinanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	101,2	101,2	104,3	107,4	110,5	6. Dejiandra 7. Desisnas 8. Depolstra 9. Debang 10. Staf Ahli
Terwujudnya pelayanan Wantannas yang efektif dan efisien	56,2	56,2	58,1	59,9	61,7	4. Biro POK 5. Biro PSP 6. Biro Umum

Tabel 27
Program Teknis dan Generik

Program	Indikasi Belanja (Rp Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional	101,2	101,2	104,3	107,4	110,5
Program Dukungan Manajemen	56,2	56,2	58,1	59,9	61,7
Total	157,4	157,4	162,4	167,3	172,2

Tabel 28 . . .

Tabel 28
Kegiatan Prioritas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikasi Belanja (Rp Milyar)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional terkait Keahlian Tertentu	Penguatan Ketahanan Nasional	26,9	26,9	27,7	28,5	29,2

Tabel 29
Kegiatan Teknis
Deputi Pengkajian dan Penginderaan

Kegiatan Teknis	Indikasi Belanja (Rp Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Nasional	5,1	5,1	5,5	5,7	5,9
Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Regional	4	4	4,2	4,3	4,4
Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Internasional	5,5	5,5	5,7	5,9	6,1

Tabel 30
Kegiatan Teknis
Deputi Sistem Nasional

Kegiatan Teknis	Indikasi Belanja (Rp Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Perumusan Kebijakan Lingkungan Alam	5,9	5,9	6,1	6,3	6,5
Perumusan Kebijakan Lingkungan Sosial	6,5	6,5	6,7	6,9	7,1
Perumusan Kebijakan Pemerintahan Negara	6,4	6,4	6,6	6,8	7
Perumusan Kebijakan informasi dan Pengolahan Data	6,3	6,3	6,5	6,7	6,9

Tabel 31 . . .

Tabel 31
Kegiatan Teknis
Deputi Politik dan Strategi

Kegiatan Teknis	Indikasi Belanja (Rp Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Perumusan Kebijakan Politik Nasional	5,4	5,4	5,6	5,8	6
Perumusan Kebijakan Strategi Nasional	4,6	4,6	4,8	5	5,2
Perumusan Kebijakan Bidang Rencana kontinjensi	4,7	4,7	4,9	5,1	5,3

Tabel 32
Kegiatan Teknis
Deputi Pengembangan

Kegiatan Teknis	Indikasi Belanja (Rp Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Perumusan Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-undangan	4,4	4,4	4,6	4,8	5
Perumusan Kebijakan Bidang ekonomi	3,6	3,6	3,8	4	4,2
Perumusan Kebijakan Bidang Pertahanan Keamanan	4,9	4,9	5,1	5,3	5,5
Perumusan Kebijakan Bidang sosial budaya	3,7	3,7	3,9	4,1	4,3

Tabel 33
Kegiatan Teknis
Staf Ahli

Kegiatan Teknis	Indikasi Belanja (Rp Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional Terkait Keahlian Tertentu	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8

Tabel 34
Kegiatan Generik

Kegiatan Generik	Indikasi Belanja (dalam Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Pengelolaan layanan Perencanaan, Organisasi dan Keuangan	35,7	35,7	37,7	39,7	41,7
Pengelolaan Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan	4	4	4,2	4,4	4,6
Pengelolaan Internal Perkantoran	17,1	17,1	17,2	17,3	17,4

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dewan Ketahanan Nasional periode 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Setjen Wantannas untuk 5 tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2020-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya, serta komitmen semua pimpinan dan staf Setjen Wantannas. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2020-2024, maka setiap tahun akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target yang ditetapkan. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Setjen Wantannas termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Wantannas dan Setjen Wantannas.

Renstra Wantannas periode 2020-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Setjen Wantannas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja, dan kinerja pegawai.

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional,



Achmad Djamaludin
Laksamana Madya TNI

LAMPIRAN

Format 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga menurut RPJMN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KEMENTERIAN/LEMBAGA DEWAN KETAHANAN NASIONAL													
	Sasaran Strategis 1 Terbinanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong												WANTANNAS
	- <i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i> Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang disiapkan untuk bahan Sidang Dewan		-	80%	80%	80%	80%						
	- <i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i> Persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang ditindaklanjuti		-	80%	80%	80%	80%						
	- <i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i> Persentase saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional yang dilaporkan		-	85%	85%	85%	85%						
	- <i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i> Persentase saran tindak hasil pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dilaporkan		-	85%	85%	85%	85%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- <i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i> Persentase rumusan kebijakan dan strategi aksi Bela Negara dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang dilaporkan		85%	85%	85%	85%	85%						
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya pelayanan Wantannas yang efektif dan efisien												WANTANNAS
	- <i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i> Indeks RB		B	B	BB	BB	BB						
	- <i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i> Nilai SAKIP		70	75	80	85	90						
	- <i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i> Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	- <i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i> Jumlah penyelenggaraan Sidang Dewan		-	2	3	4	4						
PROGRAM A: Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional								9,7	8	8	8	8	SETJEN WANTANNAS
	Sasaran Program (Outcome) Terumuskannya rancangan kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional yang tangguh dan dinamis												
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase rancangan kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional yang disiapkan untuk bahan prasidang		80%	80%	80%	80%	80%						DEPUTI JIANDRA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase saran tindak hasil penginderaan nasional, regional, dan internasional yang dikirim ke Presiden		80%	80%	80%	80%	80%						
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase kajian kerjasama bidang lingkungan strategis yang dikirim ke Presiden		85%	85%	85%	85%	85%						
	Sasaran Program (Outcome) Terumuskannya rancangan Kebijakan sistem nasional yang tangguh dan dinamis												
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase rancangan kebijakan sistem nasional yang disiapkan untuk bahan prasidang		80%	80%	80%	80%	80%						DEPUTI SISNAS
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional dikirim ke Presiden		80%	80%	80%	80%	80%						
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase kajian kerjasama yang disiapkan bahan masukan Presiden		85%	85%	85%	85%	85%						
	Sasaran Program (Outcome) Terumuskannya rancangan kebijakan politik, strategi nasional, dan rencana kontinjensi yang Tangguh dan dinamis												
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase rancangan kebijakan politik strategi nasional dan rencana kontinjensi yang disiapkan untuk bahan prasidang		80%	80%	80%	80%	80%						DEPUTI POLSTRA

- Indikator . . .

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden		80%	80%	80%	80%	80%						
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase perumusan perkiraan batas toleransi resiko pembangunan yang disiapkan untuk bahan masukan pengambilan keputusan		80%	80%	80%	80%	80%						
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase kajian kerjasama yang dikirim ke Presiden		85%	85%	85%	85%	85%						
	Sasaran Program (Outcome) Terumuskannya hasil pengukuran pembangunan nasional dan kondisi kehidupan nasional serta kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional yang tangguh dan dinamis												
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase rancangan kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional yang disiapkan untuk bahan prasadang		80%	80%	80%	80%	80%						DEPUTI PENGEMBANGAN
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan penyimpangan pembangunan nasional yang dikirim ke Presiden		80%	80%	80%	80%	80%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase saran tindak hasil pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden		80%	80%	80%	80%	80%						
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase kajian kerjasama bidang pengembangan ketahanan yang dikirim ke Presiden		85%	85%	85%	85%	85%						
	Sasaran Program (Outcome) Terumuskannya Kebijakan Terkait Keahlian Tertentu yang Tangguh dan dinamis												
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase rancangan kebijakan aksi Bela Negara untuk pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang disiapkan		85%	85%	85%	85%	85%						STAF AHLI
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase rancangan saran kebijakan ketahanan nasional terkait yang keahlian tertentu yang disiapkan bahan masukan pengambilan keputusan pimpinan		85%	85%	85%	85%	85%						
Kegiatan 1:	Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional Terkait Keahlian Tertentu							0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	STAF AHLI
	Sasaran Kegiatan Penguatan ketahanan nasional												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan aksi Bela Negara		1	4	4	4	4						

Sasaran . . .

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sasaran Kegiatan Meningkatnya Keandalan telaahan, saran, dan pertimbangan serta rekomendasi yang tangguh dan dinamis												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah telaahan, saran, dan pertimbangan serta rekomendasi yang dihasilkan		20	5	5	5	5						
Kegiatan 2: Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Nasional								0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	BANDEP LINGSTRANAS
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya Kirstranas, Telstranas, dan Apstranas lingkungan strategis nasional												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah Kirstranas, Telstranas, dan Apstranas lingkungan strategis nasional yang dihasilkan		2	2	2	2	2						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil penginderaan lingkungan strategis nasional												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak penginderaan lingkungan strategis nasional yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya kajian kerja sama bidang lingkungan strategis nasional												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah kajian kerja sama bidang lingkungan strategis nasional yang dihasilkan		1	1	2	3	3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kegiatan 3: Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Regional							0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	BANDEP LINGSTRAREG
Sasaran Kegiatan Terumuskannya Kistranas, Telstranas, dan Apstranas kajian lingkungan strategis regional												
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah Kistranas, Telstranas, dan Apstranas lingkungan strategis regional yang dihasilkan		2	2	2	2	2						
Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil penginderaan lingkungan strategis regional												
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak penginderaan lingkungan strategis regional yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
Sasaran Kegiatan Terumuskannya hasil kajian kerja sama bidang lingkungan strategis regional												
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah kajian kerja sama bidang lingkungan strategis regional yang dihasilkan		1	1	2	3	3						
Kegiatan 4: Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Internasional							0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	BANDEP LINGSTRAINT
Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran kebijakan lingkungan strategis internasional												
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran kebijakan lingkungan strategis internasional yang dihasilkan		1	1	2	2	2						

Sasaran . . .

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil penginderaan lingkungan strategis internasional												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak penginderaan lingkungan strategis internasional yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya hasil kajian kerja sama bidang lingkungan strategis internasional												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah hasil kajian kerja sama bidang lingkungan strategis internasional yang dihasilkan		1	1	2	3	3						
Kegiatan 5: Perumusan Kebijakan Lingkungan Alam								0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	BANDEP LINGKUNGAN ALAM
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya rancangan kebijakan sistem nasional bidang lingkungan alam												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah rancangan kebijakan sistem nasional bidang lingkungan alam yang dihasilkan		2	1	2	2	2						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang lingkungan alam												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang lingkungan alam yang dihasilkan		3	3	6	9	9						

Sasaran . . .

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya kajian kerja sama bidang lingkungan alam												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah kajian kerja sama bidang lingkungan alam yang dihasilkan		1	1	2	3	3						
Kegiatan 6: Perumusan Kebijakan Lingkungan Sosial								0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	BANDEP LINGSOS
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya rancangan kebijakan sistem nasional bidang lingkungan sosial												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah rancangan kebijakan sistem nasional bidang lingkungan sosial yang dihasilkan		2	1	2	2	2						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang lingkungan sosial												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang lingkungan Sosial yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya kajian kerjasama bidang lingkungan sosial												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah hasil kajian kerjasama bidang lingkungan sosial yang dihasilkan		1	1	2	3	3						
Kegiatan 7: Perumusan Kebijakan Pemerintahan Negara								0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	BANDEP LINGPEMNEG
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya rancangan kebijakan bidang pemerintahan negara												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah rancangan kebijakan bidang pemerintahan negara yang dihasilkan		2	1	2	2	2						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional bidang pemerintahan negara												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang pemerintahan negara yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terwujudnya Kajian kerja sama bidang pemerintahan negara												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah kajian kerja sama bidang pemerintahan negara yang dihasilkan		1	1	2	3	3						
	Kegiatan 8: Perumusan Kebijakan Informasi dan Pengolahan Data							0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	BANDEP INFOLAHTA
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya Rancangan kebijakan bidang Informasi dan Pengolahan Data												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah rancangan kebijakan informasi dan pengolahan data yang dihasilkan		2	1	2	2	2						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional bidang informasi dan pengelolaan data												

- Indikator . . .

1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah kajian kerja sama bidang politik nasional yang dihasilkan		1	1	2	3	3							
Kegiatan 10: Perumusan Kebijakan Strategi Nasional								0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	BANDEP STRANAS	
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya rancangan kebijakan dan strategi nasional													
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah rancangan kebijakan dan strategi nasional yang dihasilkan		1	1	1	1	1							
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil evaluasi dan batas toleransi resiko pembangunan nasional													
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak hasil evaluasi dan batas toleransi resiko pembangunan nasional yang dihasilkan		3	3	6	9	9							
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya kajian kerjasama bidang strategi nasional													
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah kajian kerjasama bidang strategi nasional yang dihasilkan		1	1	2	3	3							
Kegiatan 11: Perumusan Kebijakan Bidang Rencana kontinjensi								1	0,5	0,5	0,5	0,5	BANDEP RENKON	
	Sasaran Kegiatan Kegiatan Terumuskannya rancangan kebijakan bidang perencanaan kontinjensi													

- Indikator . . .

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah rancangan kebijakan perencanaan kontinjensi yang dihasilkan		1	1	1	1	1						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil identifikasi dan klasifikasi ancaman stabilitas nasional												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak hasil identifikasi dan klasifikasi ancaman stabilitas nasional yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya kajian kerjasama bidang perencanaan kontinjensi												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah kajian kerjasama untuk penyusunan rencana kontinjensi yang dihasilkan		1	1	2	3	3						
Kegiatan 12 : Perumusan Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-undangan								0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	BANDEP KUMDANG
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya rancangan kebijakan bidang hukum dan perundang-undangan												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah rancangan kebijakan bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan		2	1	2	2	2						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang hukum dan perundang-undangan												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang hukum dan Perundang-undangan yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang hukum dan Perundang-undangan												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya kajian kerjasama bidang hukum dan perundang-undangan												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah kajian kerjasama bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan		1	1	2	3	3						
Kegiatan 13: Perumusan Kebijakan Bidang ekonomi								0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	BANDEP EKONOMI
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya Rancangan kebijakan ekonomi												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah rancangan kebijakan ekonomi yang dihasilkan		2	1	2	2	2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang ekonomi												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang ekonomi yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang ekonomi												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang ekonomi yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya kajian kerjasama aspek ekonomi												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah kajian kerja sama-kerja sama bidang ekonomi yang dihasilkan		1	1	2	3	3						
Kegiatan 14: Perumusan Kebijakan Bidang Pertahanan Keamanan								0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	BANDEP HANKAM
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya Rancangan kebijakan Pertahanan Keamanan												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah rancangan kebijakan pertahanan keamanan yang dihasilkan		2	1	2	2	2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang Pertahanan Keamanan												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang Pertahanan Keamanan yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang pertahanan keamanan												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang pertahanan keamanan yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya kajian kerjasama bidang pertahanan keamanan												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah kajian kerja sama kerjasama bidang pertahanan keamanan yang dihasilkan		1	1	2	3	3						
	Kegiatan 15: Perumusan Kebijakan Bidang Sosial Budaya							0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	BANDEP SOSBUD
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya Rancangan kebijakan sosial budaya												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah rancangan kebijakan sosial		2	1	2	2	2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	budaya yang dihasilkan												
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang sosial budaya												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang sosial budaya yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang sosial budaya												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang sosial budaya yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya kajian kerjasama bidang sosial budaya												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah kajian kerjasama bidang sosial budaya yang dihasilkan		1	1	2	3	3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM B: Program Dukungan Manajemen							37	42.4	42.4	42.4	42.4	SETJEN WANTANNAS
Sasaran Program (Outcome) Terkelolanya Perencanaan, Organisasi dan Keuangan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi												BIRO POK
- Indikator Kinerja Program Jumlah Layanan yang dihasilkan pada bagian Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan		5	6	6	6	6						
- Indikator Kinerja Program Opini BPK atas LK Wantannas		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
- Indikator Kinerja Program Nilai Penerapan RB Wantannas		B	B	BB	BB	A						
- Indikator Kinerja Program Nilai SAKIP		70	75	80	85	90						
Sasaran Program (Outcome) Terwujudnya dukungan internal perkantoran yang berkualitas dan berkinerja tinggi												BIRO UMUM
- Indikator Kinerja Program Jumlah Layanan yang dihasilkan pada bagian Kepegawaian, Perlengkapan dan TUP		5	5	5	5	5						
- Indikator Kinerja Program Kategori kualitas pengelolaan BMN		3	2	2	2	2						
- Indikator Kinerja Program Indeks Hasil Pengawasan Arsip		B	B	B	B	B						
- Indikator Kinerja Program Indeks Profesionalitas ASN		70	75	80	82	85						

Sasaran . . .

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sasaran Program (Outcome) Terkelolanya Layanan persidangan, sistem informasi dan Pengawasan internal yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi												BIRO PSP
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Jumlah Layanan yang dihasilkan pada bagian Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal		3	4	4	4	4						
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Maturitas SPIP		4	4	4	4	4						
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Peringkat keterbukaan informasi publik		C.I	M.I	M.I	M.I	I						
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Peringkat Keamanan Informasi (KAMI) K/L		6	5	5	5	4						
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase Sidang Dewan yang terlaksana		-	50%	50%	75%	75%						
	Kegiatan 16 : Pengelolaan layanan Perencanaan, Organisasi dan Keuangan							25.2	29.2	29.2	29.2	29.2	KARO POK
	Sasaran Kegiatan Terlaksananya layanan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang berkualitas												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Persentase dokumen perencanaan yang dihasilkan di Setjen Wantannas		100	100	100	100	100						
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Setjen Wantannas yang terlaksana		100	100	100	100	100						

Sasaran . . .

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sasaran Kegiatan Terlaksananya layanan organisasi yang berkualitas												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Persentase penyelesaian proses bisnis dan layanan penataan organisasi		100	100	100	100	100						
	Sasaran Kegiatan Terlaksananya layanan keuangan yang berkualitas												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Persentase penyerapan anggaran Setjen Wantannas		90	90	90	90	90						
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan		100	100	100	100	100						
	Sasaran Kegiatan Terlaksananya layanan Reformasi Birokrasi												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Nilai Penerapan RB Wantannas		B	B	BB	BB	A						
	Sasaran Kegiatan Terlaksananya layanan perkantoran (gaji)												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Persentase pembayaran gaji tepat waktu		100	100	100	100	100						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kegiatan 17: Pengelolaan Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan							0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	KARO PSP
Sasaran Kegiatan Terlaksananya layanan persidangan dan kehumasan												
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Peringkat keterbukaan informasi publik		5	5	4	4	3						
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah Sidang Dewan yang terlaksana		-	2	3	4	4						
Sasaran Kegiatan Terlaksananya layanan data dan informasi yang optimal												
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Peringkat Keamanan Informasi (KAMI) K/L		6	5	5	5	4						
Sasaran Kegiatan Terlaksananya layanan pengawasan internal yang berkualitas												
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Nilai internal Audit <i>Capability Model</i> (IA-CM)		3	3	4	4	5						
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		4	4	5	5	5						
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Nilai zona Integritas (ZI)		2	2	3	3	4						
Kegiatan 18: Pengelolaan Internal Perkantoran							11	12.5	12.5	12.5	12.5	KARO UMUM
Sasaran Kegiatan Terlaksananya layanan manajemen SDM yang berkualitas												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Persentase pelaksanaan layanan manajemen SDM yang berkualitas		100	100	100	100	100						
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Indeks Profesionalitas ASN		70	75	80	82	85						
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Layanan manajemen BMN yang transparan dan akuntabel												
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Persentase pelaksanaan layanan manajemen BMN yang transparan dan akuntabel		100	100	100	100	100						
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Kategori kualitas pengelolaan BMN		3	2	2	2	2						
Sasaran Kegiatan Terlaksananya layanan protokoler yang efektif dan efisien												
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Persentase pelaksanaan layanan protokoler yang efektif dan efisien		100	100	100	100	100						
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Maturitas Arsip		B	B	B	B	B						
Sasaran Kegiatan Terlaksananya layanan umum												
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Persentase pelaksanaan layanan umum yang handal dan berkualitas		100	100	100	100	100						
Sasaran Kegiatan Terlaksananya layanan perkantoran yang berkualitas												
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Persentase layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang berkualitas		100	100	100	100	100						

Format 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga menurut anggaran ideal Wantannas 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam miliar rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
KEMENTERIAN/LEMBAGA DEWAN KETAHANAN NASIONAL								157,4	157,4	162,4	167,3	172,2	
	Sasaran Strategis 1 Terbinanya kondisi ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis dalam rangka mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong												WANTANNAS
	- <i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i> Persentase rumusan kebijakan dan strategi ketahanan nasional yang disiapkan untuk bahan Sidang Dewan		-	80%	80%	80%	80%						
	- <i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i> Persentase rumusan saran tindak ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang ditindaklanjuti		-	80%	80%	80%	80%						
	- <i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i> Persentase saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional yang dilaporkan		-	85%	85%	85%	85%						
	- <i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i> Persentase saran tindak hasil pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dilaporkan		-	85%	85%	85%	85%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- <i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i> Persentase rumusan kebijakan dan strategi aksi Bela Negara dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang dilaporkan		85%	85%	85%	85%	85%						
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya pelayanan Wantannas yang efektif dan efisien												WANTANNAS
	- <i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i> Indeks RB		B	B	BB	BB	BB						
	- <i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i> Nilai SAKIP		70	75	80	85	90						
	- <i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i> Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	- <i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i> Jumlah penyelenggaraan Sidang Dewan		-	2	3	4	4						
PROGRAM A: Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional								101,2	101,2	104,3	107,4	110,5	SETJEN WANTANNAS
	Sasaran Program (Outcome) Terumuskannya rancangan kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional yang tangguh dan dinamis												
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase rancangan kebijakan dan strategi nasional, regional, dan internasional yang disiapkan untuk bahan presidang		80%	80%	80%	80%	80%						DEPUTI JIANDRA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase saran tindak hasil penginderaan nasional, regional, dan internasional yang dikirim ke Presiden		80%	80%	80%	80%	80%						
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase kajian kerjasama bidang lingkungan strategis yang dikirim ke Presiden		85%	85%	85%	85%	85%						
	Sasaran Program (Outcome) Terumuskannya rancangan Kebijakan sistem nasional yang tangguh dan dinamis												
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase rancangan kebijakan sistem nasional yang disiapkan untuk bahan prasidang		80%	80%	80%	80%	80%						DEPUTI SISNAS
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional dikirim ke Presiden		80%	80%	80%	80%	80%						
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase kajian kerjasama yang disiapkan bahan masukan Presiden		85%	85%	85%	85%	85%						
	Sasaran Program (Outcome) Terumuskannya rancangan kebijakan politik, strategi nasional, dan rencana kontinjensi yang Tangguh dan dinamis												
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase rancangan kebijakan politik strategi nasional dan rencana kontinjensi yang disiapkan untuk bahan prasidang		80%	80%	80%	80%	80%						DEPUTI POLSTRA

- Indikator . . .

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden		80%	80%	80%	80%	80%						
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase perumusan perkiraan batas toleransi resiko pembangunan yang disiapkan untuk bahan masukan pengambilan keputusan		80%	80%	80%	80%	80%						
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase kajian kerjasama yang dikirim ke Presiden		85%	85%	85%	85%	85%						
	Sasaran Program (Outcome) Terumuskannya hasil pengukuran pembangunan nasional dan kondisi kehidupan nasional serta kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional yang tangguh dan dinamis												
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase rancangan kebijakan mobilisasi sumber kekuatan nasional yang disiapkan untuk bahan prasadang		80%	80%	80%	80%	80%						DEPUTI PENGEMBANGAN
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan penyimpangan pembangunan nasional yang dikirim ke Presiden		80%	80%	80%	80%	80%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase saran tindak hasil pengukuran kondisi kehidupan nasional yang dikirim ke Presiden		80%	80%	80%	80%	80%						
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase kajian kerjasama bidang pengembangan ketahanan yang dikirim ke Presiden		85%	85%	85%	85%	85%						
	Sasaran Program (Outcome) Terumuskannya Kebijakan Terkait Keahlian Tertentu yang Tangguh dan dinamis												
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase rancangan kebijakan aksi Bela Negara untuk pembinaan ketahanan nasional yang tangguh dan dinamis yang disiapkan		85%	85%	85%	85%	85%						STAF AHLI
	- <i>Indikator Kinerja Program</i> Persentase rancangan saran kebijakan ketahanan nasional terkait yang keahlian tertentu yang disiapkan bahan masukan pengambilan keputusan pimpinan		85%	85%	85%	85%	85%						
Kegiatan 1:	Perumusan Saran Tindak Kebijakan dan Strategi Nasional Terkait Keahlian Tertentu							26,9	26,9	27,7	28,5	29,2	STAF AHLI
	Sasaran Kegiatan Penguatan ketahanan nasional												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan aksi Bela Negara		1	4	4	4	4						

Sasaran . . .

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sasaran Kegiatan Meningkatnya Keandalan telaahan, saran, dan pertimbangan serta rekomendasi yang tangguh dan dinamis												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah telaahan, saran, dan pertimbangan serta rekomendasi yang dihasilkan		20	5	5	5	5						
Kegiatan 2: Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Nasional								5,1	5,1	5,5	5,7	5,9	BANDEP LINGSTRANAS
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya Kirstranas, Telstranas, dan Apstranas lingkungan strategis nasional												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah Kirstranas, Telstranas, dan Apstranas lingkungan strategis nasional yang dihasilkan		2	2	2	2	2						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil penginderaan lingkungan strategis nasional												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak penginderaan lingkungan strategis nasional yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya kajian kerja sama bidang lingkungan strategis nasional												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah kajian kerja sama bidang lingkungan strategis nasional yang dihasilkan		1	1	2	3	3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kegiatan 3: Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Regional							4	4	4,2	4,3	4,4	BANDEP LINGSTRAREG
Sasaran Kegiatan Terumuskannya Kistranas, Telstranas, dan Apstranas kajian lingkungan strategis regional												
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah Kistranas, Telstranas, dan Apstranas lingkungan strategis regional yang dihasilkan		2	2	2	2	2						
Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil penginderaan lingkungan strategis regional												
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak penginderaan lingkungan strategis regional yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
Sasaran Kegiatan Terumuskannya hasil kajian kerja sama bidang lingkungan strategis regional												
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah kajian kerja sama bidang lingkungan strategis regional yang dihasilkan		1	1	2	3	3						
Kegiatan 4: Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Strategis Internasional							5,5	5,5	5,7	5,9	6,1	BANDEP LINGSTRAINT
Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran kebijakan lingkungan strategis internasional												
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran kebijakan lingkungan strategis internasional yang dihasilkan		1	1	2	2	2						

Sasaran . . .

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil penginderaan lingkungan strategis internasional												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak penginderaan lingkungan strategis internasional yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya hasil kajian kerja sama bidang lingkungan strategis internasional												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah hasil kajian kerja sama bidang lingkungan strategis internasional yang dihasilkan		1	1	2	3	3						
Kegiatan 5: Perumusan Kebijakan Lingkungan Alam								5,9	5,9	6,1	6,3	6,5	BANDEP LINGKUNGAN ALAM
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya rancangan kebijakan sistem nasional bidang lingkungan alam												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah rancangan kebijakan sistem nasional bidang lingkungan alam yang dihasilkan		2	1	2	2	2						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang lingkungan alam												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang lingkungan alam yang dihasilkan		3	3	6	9	9						

Sasaran . . .

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya kajian kerja sama bidang lingkungan alam												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah kajian kerja sama bidang lingkungan alam yang dihasilkan		1	1	2	3	3						
Kegiatan 6: Perumusan Kebijakan Lingkungan Sosial								6,5	6,5	6,7	6,9	7,1	BANDEP LINGSOS
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya rancangan kebijakan sistem nasional bidang lingkungan sosial												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah rancangan kebijakan sistem nasional bidang lingkungan sosial yang dihasilkan		2	1	2	2	2						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang lingkungan sosial												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang lingkungan Sosial yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya kajian kerjasama bidang lingkungan sosial												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah hasil kajian kerjasama bidang lingkungan sosial yang dihasilkan		1	1	2	3	3						
Kegiatan 7: Perumusan Kebijakan Pemerintahan Negara								6,4	6,4	6,6	6,8	7	BANDEP LINGPEMNEG
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya rancangan kebijakan bidang pemerintahan negara												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah rancangan kebijakan bidang pemerintahan negara yang dihasilkan		2	1	2	2	2						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional bidang pemerintahan negara												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang pemerintahan negara yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terwujudnya Kajian kerja sama bidang pemerintahan negara												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah kajian kerja sama bidang pemerintahan negara yang dihasilkan		1	1	2	3	3						
	Kegiatan 8: Perumusan Kebijakan Informasi dan Pengolahan Data							6,3	6,3	6,5	6,7	6,9	BANDEP INFOLAHTA
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya Rancangan kebijakan bidang Informasi dan Pengolahan Data												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah rancangan kebijakan informasi dan pengolahan data yang dihasilkan		2	1	2	2	2						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kehidupan nasional bidang informasi dan pengelolaan data												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak hasil pemantauan pantauan kondisi kehidupan nasional bidang informasi dan pengelolaan data yang dihasilkan		2	2	4	6	6						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya kajian kerja sama bidang informasi dan pengolahan data												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah kajian kerja sama bidang informasi dan pengolahan data yang dihasilkan		1	1	2	3	3						
Kegiatan 9: Perumusan Kebijakan Politik Nasional								5,4	5,4	5,6	5,8	6	BANDEP POLNAS
	Sasaran Kegiatan Kegiatan Terumuskannya rancangan kebijakan bidang politik nasional												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah rancangan kebijakan politik nasional yang dihasilkan		1	1	2	2	2						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pemantauan kondisi kehidupan nasional bidang politik nasional												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak hasil pemantauan Kondisi kehidupan nasional bidang politik nasional yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya kajian kerja sama bidang politik nasional												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah kajian kerja sama bidang politik nasional yang dihasilkan		1	1	2	3	3						
Kegiatan 10: Perumusan Kebijakan Strategi Nasional								4,6	4,6	4,8	5	5,2	BANDEP STRANAS
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya rancangan kebijakan dan strategi nasional												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah rancangan kebijakan dan strategi nasional yang dihasilkan		1	1	1	1	1						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil evaluasi dan batas toleransi resiko pembangunan nasional												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak hasil evaluasi dan batas toleransi resiko pembangunan nasional yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya kajian kerjasama bidang strategi nasional												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah kajian kerjasama bidang strategi nasional yang dihasilkan		1	1	2	3	3						
Kegiatan 11: Perumusan Kebijakan Bidang Rencana kontinjensi								4,7	4,7	4,9	5,1	5,3	BANDEP RENKON
	Sasaran Kegiatan Kegiatan Terumuskannya rancangan kebijakan bidang perencanaan kontinjensi												

- Indikator . . .

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah rancangan kebijakan perencanaan kontinjensi yang dihasilkan		1	1	1	1	1						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil identifikasi dan klasifikasi ancaman stabilitas nasional												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak hasil identifikasi dan klasifikasi ancaman stabilitas nasional yang dihasilkan		3	6	9	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya kajian kerjasama bidang perencanaan kontinjensi												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah kajian kerjasama untuk penyusunan rencana kontinjensi yang dihasilkan		1	2	3	3	3						
	Kegiatan 12 : Perumusan Kebijakan Bidang Hukum dan Perundang-undangan							4,4	4,4	4,6	4,8	5	BANDEP KUMDANG
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya rancangan kebijakan bidang hukum dan perundang-undangan												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah rancangan kebijakan bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan		2	1	2	2	2						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang hukum dan perundang-undangan												

- Indikator . . .

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang hukum dan Perundang-undangan yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang hukum dan Perundang-undangan												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya kajian kerjasama bidang hukum dan perundang-undangan												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah kajian kerjasama bidang hukum dan perundang-undangan yang dihasilkan		1	1	2	3	3						
Kegiatan 13: Perumusan Kebijakan Bidang ekonomi								3,6	3,6	3,8	4	4,2	BANDEP EKONOMI
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya Rancangan kebijakan ekonomi												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah rancangan kebijakan ekonomi yang dihasilkan		2	1	2	2	2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang ekonomi												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang ekonomi yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang ekonomi												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang ekonomi yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya kajian kerjasama aspek ekonomi												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah kajian kerja sama-kerja sama bidang ekonomi yang dihasilkan		1	1	2	3	3						
Kegiatan 14: Perumusan Kebijakan Bidang Pertahanan Keamanan								4,9	4,9	5,1	5,3	5,5	BANDEP HANKAM
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya Rancangan kebijakan Pertahanan Keamanan												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah rancangan kebijakan pertahanan keamanan yang dihasilkan		2	1	2	2	2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang Pertahanan Keamanan												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang Pertahanan Keamanan yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang pertahanan keamanan												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang pertahanan keamanan yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya kajian kerjasama bidang pertahanan keamanan												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah kajian kerja sama kerjasama bidang pertahanan keamanan yang dihasilkan		1	1	2	3	3						
	Kegiatan 15: Perumusan Kebijakan Bidang Sosial Budaya							3,7	3,7	3,9	4,1	4,3	BANDEP SOSBUD
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya Rancangan kebijakan sosial budaya												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah rancangan kebijakan sosial		2	1	2	2	2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	budaya yang dihasilkan												
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang sosial budaya												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran dan pemecahan masalah penyimpangan pembangunan nasional bidang sosial budaya yang dihasilka		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang sosial budaya												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah saran tindak hasil pengukuran kehidupan nasional bidang sosial budaya yang dihasilkan		3	3	6	9	9						
	Sasaran Kegiatan Terumuskannya kajian kerjasama bidang sosial budaya												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah kajian kerjasama bidang sosial budaya yang dihasilkan		1	1	2	3	3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM B: Program Dukungan Manajemen							56,2	56,2	58,1	59,9	61,7	SETJEN WANTANNAS
Sasaran Program (Outcome) Terkelolanya Perencanaan, Organisasi dan Keuangan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi												BIRO POK
- Indikator Kinerja Program Jumlah Layanan yang dihasilkan pada bagian Perencanaan, Organisasi, dan Keuangan		5	6	6	6	6						
- Indikator Kinerja Program Opini BPK atas LK Wantannas		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
- Indikator Kinerja Program Nilai Penerapan RB Wantannas		B	B	BB	BB	A						
- Indikator Kinerja Program Nilai SAKIP		70	75	80	85	90						
Sasaran Program (Outcome) Terwujudnya dukungan internal perkantoran yang berkualitas dan berkinerja tinggi												BIRO UMUM
- Indikator Kinerja Program Jumlah Layanan yang dihasilkan pada bagian Kepegawaian, Perlengkapan dan TUP		5	5	5	5	5						
- Indikator Kinerja Program Kategori kualitas pengelolaan BMN		3	2	2	2	2						
- Indikator Kinerja Program Indeks Hasil Pengawasan Arsip		B	B	B	B	B						
- Indikator Kinerja Program Indeks Profesionalitas ASN		70	75	80	82	85						

Sasaran . . .

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sasaran Program (Outcome) Terkelolanya Layanan persidangan, sistem informasi dan Pengawasan internal yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi												BIRO PSP
	- Indikator Kinerja Program Jumlah Layanan yang dihasilkan pada bagian Persidangan, Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal		3	4	4	4	4						
	- Indikator Kinerja Program Maturitas SPIP		4	4	4	4	4						
	- Indikator Kinerja Program Peringkat keterbukaan informasi publik		C.I	M.I	M.I	M.I	I						
	- Indikator Kinerja Program Peringkat Keamanan Informasi (KAMI) K/L		6	5	5	5	4						
	- Indikator Kinerja Program Persentase Sidang Dewan yang terlaksana		-	50%	50%	75%	75%						
	Kegiatan 16 : Pengelolaan layanan Perencanaan, Organisasi dan Keuangan							35,7	35,7	37,7	39,7	41,7	KARO POK
	Sasaran Kegiatan Terlaksananya layanan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang berkualitas												
	- Indikator Kinerja Kegiatan Persentase dokumen perencanaan yang dihasilkan di Setjen Wantannas		100	100	100	100	100						
	- Indikator Kinerja Kegiatan Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Setjen Wantannas yang terlaksana		100	100	100	100	100						

Sasaran . . .

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sasaran Kegiatan Terlaksananya layanan organisasi yang berkualitas												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Persentase penyelesaian proses bisnis dan layanan penataan organisasi		100	100	100	100	100						
	Sasaran Kegiatan Terlaksananya layanan keuangan yang berkualitas												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Persentase penyerapan anggaran Setjen Wantannas		90	90	90	90	90						
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan		100	100	100	100	100						
	Sasaran Kegiatan Terlaksananya layanan Reformasi Birokrasi												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Nilai Penerapan RB Wantannas		B	B	BB	BB	A						
	Sasaran Kegiatan Terlaksananya layanan perkantoran (gaji)												
	- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Persentase pembayaran gaji tepat waktu		100	100	100	100	100						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kegiatan 17: Pengelolaan Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan							4	4	4,2	4,4	4,6	KARO PSP
Sasaran Kegiatan Terlaksananya layanan persidangan dan kehumasan												
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Peringkat keterbukaan informasi publik		5	5	4	4	3						
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Jumlah Sidang Dewan yang terlaksana		-	2	3	4	4						
Sasaran Kegiatan Terlaksananya layanan data dan informasi yang optimal												
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Peringkat Keamanan Informasi (KAMI) K/L		6	5	5	5	4						
Sasaran Kegiatan Terlaksananya layanan pengawasan internal yang berkualitas												
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Nilai internal Audit <i>Capability Model</i> (IA-CM)		3	3	4	4	5						
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		4	4	5	5	5						
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Nilai zona Integritas (ZI)		2	2	3	3	4						
Kegiatan 18: Pengelolaan Internal Perkantoran							17,1	17,1	17,2	17,3	17,4	KARO UMUM
Sasaran Kegiatan Terlaksananya layanan manajemen SDM yang berkualitas												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Persentase pelaksanaan layanan manajemen SDM yang berkualitas		100	100	100	100	100						
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Indeks Profesionalitas ASN		70	75	80	82	85						
Sasaran Kegiatan Terlaksananya Layanan manajemen BMN yang transparan dan akuntabel												
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Persentase pelaksanaan layanan manajemen BMN yang transparan dan akuntabel		100	100	100	100	100						
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Kategori kualitas pengelolaan BMN		3	2	2	2	2						
Sasaran Kegiatan Terlaksananya layanan protokoler yang efektif dan efisien												
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Persentase pelaksanaan layanan protokoler yang efektif dan efisien		100	100	100	100	100						
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Maturitas Arsip		B	B	B	B	B						
Sasaran Kegiatan Terlaksananya layanan umum												
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Persentase pelaksanaan layanan umum yang handal dan berkualitas		100	100	100	100	100						
Sasaran Kegiatan Terlaksananya layanan perkantoran yang berkualitas												
- <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> Persentase layanan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang berkualitas		100	100	100	100	100						

Format 2. Matriks Kerangka Regulasi

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/ INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Perpres terkait Dewan Keamanan Nasional	1. RPJMN 2020-2024 2. Mentransformasi kelembagaan Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional melalui revitalisasi dan restrukturisasi organisasi	Setjen Wantannas	Kemenko Polhukam, Kemenhan, KemenPAN dan RB, Kemenkum dan HAM, Setneg, Setkab, Setjen Wantannas	2020-2021
2	Undang-Undang Keamanan Nasional	Pembentukan ekosistem Keamanan Nasional untuk menstranformasi kekuatan nasional menjadi instrument kekuatan nasional	Kemenhan	Kemenko Polhukam, Kemenhan, Setjen Wantannas, Kemenkum dan HAM	2020-2021
3	Inpres tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara	RPJMN 2020-2024	Setjen Wantannas	Setjen Wantannas, para Kemenko, Bappenas, Setkab	2020-2024